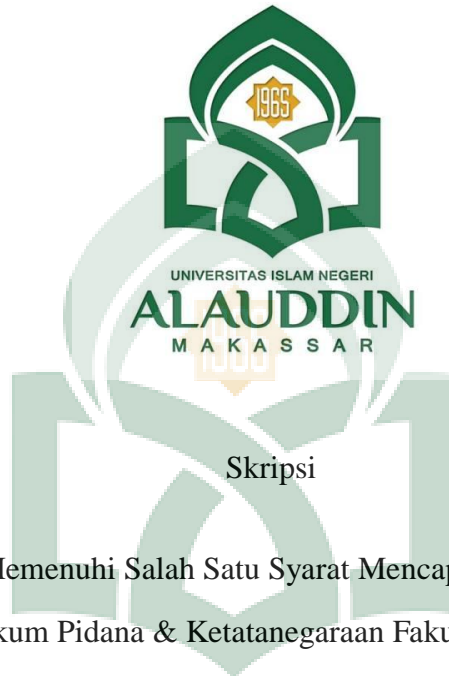


**KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
HUBUNGAN DIPLOMASI**

(TELAAH HUKUM ISLAM DAN PENDEKATAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

RASDIYANAH THAHIR

NIM: 10300113180

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rasdiyanah Thahir
NIM : 10300113180
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/05 Oktober 1995
Jur/Prodi.Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Syech Yusuf V no. 14
Judul : Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan Dalam Hubungan Internasional)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
MAKASSAR

Gowa, 15 November 2017

Penyusur



Rasdiyanah Thahir
NIM: 10300113180



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomas (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan Dalam Hubungan Internasional)”, yang disusun oleh Rasdiyanah Thahir, NIM: 10300113180, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 November 2017 M, bertepatan dengan 26 Rabi’ul Awwal 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 15 November 2017 M

26 Rabi’ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Abd Wahid Hadade, L.c., M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT seru sekalian alam, karena atas rahmatnya dan ridho-NYA, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul ***“Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan dalam Hubungan Internasional)”*** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar. Serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Almarhum Drs. Muh. Thahir dan ibunda Hasniah Thahir tercinta yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, juga untuk saudaraku tersayang Rahmatullah Thahir dan Ibadurrahman Thahir yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibunda Dra. Nila Sastawati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibunda Dr. Kurniati, M.Hi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan- masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Bapak Dr. H. Abdul Wahid Hadade, L.c, M.Hi juga sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.
5. Ibunda Dra. Nila Sastawati, M.Si, sebagai penguji I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan- masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, M.H juga sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus selaku penguji II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.
6. Teman- teman terkasih Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2013 dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada kampusku Universitas Negeri Alauddin Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

WassalamualaikumWr. Wb.

Penyusun

RASDIYANAH THAHIR



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PENGARUH HUBUNGAN DIPLOMASI TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	15-38
A. Hubungan Diplomasi Dalam Hubungan Internasional	15
B. Profil Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	29

C. Pengaruh Hubungan Diplomasi Terhadap Konflik Israel-Palestina	38
BAB III PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA..	39-64
A. Sejarah Konflik Israel-Palestina	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Israel-Palestina	47
C. Dampak Terjadinya Konflik Israel-Palestina	56
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMASI	65-86
A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Konflik Israel-Palestina	65
B. Sistem Penyelesaian Konflik Israel-Palestina.....	70
BAB V PENUTUP	87-88
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi Penelitian	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauḥla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وْ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu‘‘ima*

عُدُوْ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِإِلَهِ dīnullāh دِينَ الله

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Rasdiyanah Thahir
NIM : 10300113180
Judul : Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan dalam Hubungan Internasional)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi?. Pokok masalah kemudian di-*breakdown* ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana hubungan diplomasi terhadap konflik Israel-Palestina dalam hubungan internasional, 2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik Israel-Palestina, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dan kepustakaan (*Library Research*) yang menjelaskan secara sistematis dan normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konstitusional. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber hukum primer yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab-kitab tata negara, seperti *Al-Ahkam Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga hasil dari penelitian hukum internasional. Selanjutnya, metode pengolahan data yang digunakan adalah identifikasi data, reduksi data, dan editing data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi pemerintahan kedua belah pihak juga turut menjadikan konflik ini berkepanjangan sekaligus membuat usaha PBB sia-sia lantaran kurang dipercaya oleh keduanya. Hak rakyat Palestina untuk mendirikan Negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel) dan hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya. Adanya pengkhianatan orang-orang Arab terhadap negaranya sendiri yaitu menjual tanah mereka kepada kaum Yahudi serta penggunaan tenaga kerja dari bangsa Arab Palestina di lahan pertanian dan industri Yahudi. Pengadaan blokade yang dilakukan Israel selama lebih tujuh tahun telah memaksa warga Palestina yang tinggal di Gaza hidup dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Israel telah melanggar batas teritorial dan hukum internasional. Diplomasi yang dikenal di negara-negara Barat, peran agama sangat tidak disinggung sama sekali, bahkan tidak dikenal sama sekali oleh otoritas dalam hukum internasional dan diplomasi. Hukum internasional dalam Islam mencoba mengatur pelaksanaan sebuah negara Islam dan menerapkan dasar yang paling adil, tidak saja menyangkut hubungan dengan sesama negara Islam, akan tetapi dengan negara-negara non-Islam.

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Seluruh pemerintah di berbagai negara diharapkan berperan aktif dalam memberi dukungan dan mengupayakan diplomasi yang optimal dalam perundingan damai. 2) Bersatunya negara-negara Arab menjadi faktor penentu bagi terwujudnya negara Palestina merdeka dalam arti nyata. 3) Diplomasi Islam sangat menjunjung nilai kemanusiaan antara sesama umat, untuk menciptakan solusi damai dan promosi harmonisasi antar negara. Islam telah lama menekankan agar manusia memiliki kepribadian yang satu, sebab jika tidak, maka tidak akan tercapai keutuhan jiwa dan kedamaian pribadi. Hanya Israel dan Palestina sajalah yang dapat menuntaskan konflik ini sepenuhnya, dan bila PBB ingin membantu, sebisa mungkin inisiatif yang dilakukan harus benar-benar tidak bisa dan tidak membawa kepentingan di luar kedua negara yang berseteru ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu dalam hal positif maupun negatif.

Manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Sehingga, manusia akan melakukan interaksi antar-sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika manusia atau individu berinteraksi antar-sesama, maka mereka akan menyesuaikan diri mereka untuk membentuk kelompok tertentu. Kelompok tersebut terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama akan terbentuk kelompok yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan bersama-sama.

Ketika antar-individu ataupun antar-kelompok hingga antara individu ataupun antara kelompok melakukan suatu interaksi di lingkungan yang sama. Maka, akan menghasilkan sebuah hubungan kerja sama dan konflik. Dimana hubungan kerjasama tersebut akan membangun suatu tujuan yang bersifat positif sedangkan konflik adalah sebuah pertentangan yang akan menjadi suatu acuan untuk lebih mempererat suatu hubungan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan.

Dalam lingkungan bermasyarakat. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antar pihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan.

Kehidupan berbangsa dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan munculnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kemajemukan bangsa yang seharusnya dapat kondusif bagi pengembangan demokrasi yang ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu, yang tidak lain adalah ideologi keseragaman. Kemajemukan pada dasarnya juga dapat berpotensi mengganggu stabilitas politik, jika tidak dikelola dengan baik. Karena negara perlu menyeragamkan setiap elemen kemajemukan dalam bermasyarakat sesuai dengan karsanya, tanpa harus merasa telah mengingkari prinsip dasar hidup bersama dalam keberagaman. Dengan segala kekuasaan yang ada pada negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara koersif agar masyarakat tunduk pada ideologi negara yang maunya serba seragam, serba tunggal. Perlakuan negara demikian diapresiasi dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kesadaran

sosial politiknya. Pada gilirannya kesadaran yang mengarahkan sikap dan perilaku sosial masyarakat kepada hal-hal yang bersifat diskriminatif, kekerasan, dan dehumanisasi. Penerimaan masyarakat terhadap pluralitas kurang lebih sama dengan sebangun dengan penerimaan atas fakta sosiologis-kultural. Karena subjektivitas masyarakat kian menonjol dan pada gilirannya menafikan kelompok lain dalam alam pikirnya diyakini “berbeda”. Dari sinilah konflik-konflik sosial politik memperoleh legitimasi rasionalnya. Negara patut diletakkan sebagai faktor dominan yang telah membentuk pola pikir dan kesadaran bias state masyarakat semakin menonjol dalam berbagai pola perilaku sosial dan politik. Munculnya reformasi telah menyediakan ruang yang lebih lebar bagi artikulasi pendapat dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Fenomena perkembangan kehidupan manusia berdampak pada timbulnya perubahan dalam struktur kehidupan sosial, termasuk dalam bidang hukum yang bukan hanya mencakup perubahan struktur dan substansi hukumnya akan tetapi juga menyangkut perubahan kultur hukum. Konsekuensi logis dari perubahan sosial seringkali menimbulkan *conflict of interest* yang memunculkan berbagai pola-pola baru dalam kehidupan sosial untuk mempertahankan hidup (*survive*). Perubahan-perubahan yang serba cepat ditengah perbedaan kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan diri pribadi serta timbulnya kesenjangan sosial, ekonomi, hukum yang tidak sedikit mempengaruhi aspek politik.¹

¹Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Dikutip dalam situs, www.jurnal.com (Diakses Januari 2016).

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu, golongan, atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.²

Diplomasi merupakan sebuah praktek pelaksanaan hubungan antar negara yang melalui perwakilan resmi, yang mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri serta pelaksanaannya. Diplomasi bermula dari sebuah hubungan manusia dengan manusia, berkembang menjadi hubungan kelompok dengan kelompok yang kemudian meluas menjadi hubungan antar negara yang digunakan oleh negara-negara sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan, melakukan komunikasi yang harmonis, memperjuangkan *national interest*-nya dan mencapai perdamaian.

Pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomasi dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Melalui pendekatan-

²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 47-48

pendekatan tertentu, hubungan diplomasi terbentuk di dasari oleh tujuan dengan adanya komunikasi internasional dan hubungan internasional. Diplomasi dilancarkan dengan memperhatikan pilihan kata yang digunakan dalam kemasan pesan. Komunikasi internasional lebih banyak menekankan kajian atas realitas politik dengan fokus perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain sebagai realitas politik yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain.³ Sedangkan hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerja sama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional.

Terkait suatu hal mengenai tentang sengketa internasional, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*). Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.⁴

³Mohammad Sholehi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011) h. 1-2

⁴Sefriani, *Hukum Internasional* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 322

Isu Palestina merupakan permasalahan penting dan sentral di dalam kehidupan umat Islam, sepanjang sejarah pertentangannya dengan Yahudi. Permasalahan Palestina telah menguras pikiran dan emosi para pemerhati problematika umat Islam. Pertentangannya umat Islam dengan orang-orang Yahudi menjadikan keyakinan agama dan sejarah sebagai dasarnya. Meskipun hanya berupa klaim Taurat yang diragukan kebenarannya, dasar-dasar ini mampu menjadi motivasi abadi yang menguasai wilayah kependudukan, sebagai realisasi wasiat suci Taurat “tanah yang dijanjikan” dan atas status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan.⁵

Kontak antara Israel dan Palestina dikategorikan pada hubungan internasional yang dapat didefinisikan sebagai rangkaian aksi antar berbagai kelompok, baik berbentuk negara, bangsa, organisasi internasional, kelompok perorangan, maupun pribadi yang berpengaruh. Sebab hubungan internasional tidak hanya mencakup pada bidang politik, tetapi juga menjangkau segala kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lainnya. Hubungan internasional memiliki tujuan dasar untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara, maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku tersebut dapat berupa perang, konflik, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya. Benturan antara keduanya kemudian berkembang menjadi sebuah konflik terbuka yang memperebutkan wilayah Palestina. Di satu pihak, Palestina berjuang untuk merebut kembali wilayah tanah air mereka yang sah, sedangkan Israel berusaha

⁵Mahir Ahmad Agha, *Yahudi Catatan Hitam Sejarah* (Cet. XII; Jakarta: Qisthi Press, 2010) h. 1-2.

untuk mempertahankan dan memperluas wilayah yang telah berhasil direbut dan dikuasainya.⁶

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik dua internasional yang paling lama, dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara barat. Konflik terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina, kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara yaitu wilayah diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut.⁷

Negara baru Yahudi itu di dukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam beberapa setelah proklamasi, hak keberadaan negara baru tersebut segera diakui oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, negara-negara Arab di sekeliling negara baru itu menolak memberikan pengakuan serupa. Mereka beragumen bahwa selama seribu tahun, orang-orang Arab telah hidup di Palestina dan negara-negara adikuasa tak punya hak untuk memberikan tanah orang-orang Arab begitu saja kepada kaum atau bangsa lain, sekadar demi membayar rasa bersalah mereka atas sikap anti-Semitisme di Barat dan sekedar untuk menempatkan sebuah

⁶Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi* (Cet. III; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005) h. 10-12.

⁷Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 1.

negara yang didukung Barat di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab bersumpah untuk memusnahkan negara baru tersebut.⁸

Sementara sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang segera meningkat menjadi perang dalam skala yang lebih luas. Peperangan yang berlangsung sampai sekarang telah banyak menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina, memicu konflik regional di kawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh Israel tersebut memicu konflik yang semakin meluas, melibatkan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran, dan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina tidak dicetuskan oleh suatu perjuangan antikolonial oleh rakyat untuk membela tanah airnya dan berperang melawan penjajah asing. Sebaliknya, kemerdekaan Israel diperoleh dan diproklamasikan oleh komunitas pendatang, bahkan proklamasi itu diawali dengan pengusiran dan pembersihan etnis yang telah menempati Palestina sejak zaman prasejarah.

Hal tersebut mengakibatkan perang antar penduduk sipil telah meluas menjadi konflik internasional. Kelanjutan dari peristiwa tersebut, hingga kini setidaknya telah terjadi lima kali perang Arab-Israel yang kebanyakan berintikan konflik Palestina-Israel. Sampai saat ini, negara-negara Arab mencapai hasil yang memprihatkan pada

⁸Karen Amstrong, *Holy War The Crusades and Their Impact on Today's World*, (New York: Anchor Books, 2001) terjem. Hikmat Darmawan, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003) h. 135

hampir semua konfrontasi dengan Israel. Setelah pihak berusaha untuk menyelesaikan perundingan diplomasi politik.⁹

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, peneliti berusaha untuk menganalisis terkait konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik, yang sudah diketahui bahwa konflik yang terjadi antar-negara ini merupakan hal yang sangat sulit untuk didamaikan. Namun, melalui hubungan diplomatik tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses membangun hubungan diplomasi dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok permasalahan dari karya tulis ini yaitu Bagaimana Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi? Dari pokok permasalahan tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konflik Israel-Palestina terhadap hubungan diplomasi dalam hubungan internasional?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik Israel-Palestina?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi?

⁹Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 2-8

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka akan dideskripsikan pengertian judul yang dianggap penting.

1. Konflik

Konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (hostility) antara pihak-pihak yang seringkali tidak fokus.¹⁰ Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

2. Israel-Palestina

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia:

- a. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai.
- b. Palestina adalah sebuah negara Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan.

3. Hubungan

Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain.

4. Diplomasi

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.

¹⁰Sefriani, *Hukum Internasional* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 322

5. Hukum islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

6. Pendekatan

Pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan mendekati.

D. *Kajian Pustaka*

Dengan memperhatikan tema yang dibahas, maka sumber data yang diperlukan berkenaan dengan buku-buku atau literatur mengenai masalah-masalah hubungan internasional dalam islam.

Mahir Ahmad Agha dalam bukunya *Yahudi Catatan Hitam Akhir Sejarah*. Yang diterbitkan oleh Qisti Press tahun 2010. Dalam buku ini membahas mengenai Palestina yang menjadi permasalahan penting dan sentral di kehidupan umat Islam. Pembahasannya mencakup mengenai catatan sejarah awal mula munculnya konflik yang menjadikan Palestina adalah sebuah negara yang di hadapi oleh penderitaan, pertentangan, dan persinggungannya dengan Yahudi dalam perspektif islam. Dimana kejahatan yang dilakukan di tengah malam, setelah melewati serangkaian pengintaian dan pengkajian, ditengah-tengah kelalaian umat Islam, ketika pemerintahan colonial bekerja sama dengan para pengkhianat Arab dalam pencurian dan perampasan tanah secara zalim dan penuh permusuhan.

¹¹Mardani, *Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.

Karen Amstrong dalam bukunya *Perang Suci*. Yang diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta tahun 2003. Dalam buku ini membahas mengenai perang salib di tahun 1095 untuk merebut kota suci Yerusalem dari kaum muslim. Antologi kebencian dan dendam ini terus mengendap, menggumpal, dan kemudian terwujud dalam berbagai konflik dan perang suci yang terus meletup hingga kini. Titik mula dan kelanjutannya memang bisa bermotif relegius atau sekuler, tapi akhirnya semua motif itu bercampur aduk dan memperteguh kekentalan konflik.

Hermawati dalam bukunya *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Yang diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada tahun 2005. Dalam buku ini membahas mengenai akar sejarah agama dan bangsa Yahudi dalam perjalanan sejarah yang panjang, mendirikan Negara Israel di tanah air Palestina. Sejarah Bani Israel baik dalam masa kejayaan maupun periode kehancuran dan diaspora, sampai berdirinya negara Israel dan dampaknya bagi eksistensi negara Palestina dan negara-negara Arab di Timur Tengah.

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008. Dalam buku ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu politik. Konteks ilmu politik sebagai kajian ilmiah dan praktik politik. Yang menganut konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan.

Nita Andriaanti dalam bukunya *Komunikasi Internasional dan Politik Media*. Yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2015. Dalam buku ini membahas mengenai komunikasi internasional yang berkaitan dengan hubungan internasional. Dalam hal ini akan menimbulkan unsur-unsur adanya politik dalam antarnegara.

Sefriani dalam bukunya *Hukum Internasional*. Yang diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada tahun 2014. Dalam buku ini membahas mengenai hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antarnegara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, Vatican, belligerency, merupakan contoh-contoh subjek non negara.

Mohammad Shoelhi dalam bukunya *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Yang diterbitkan oleh Simbiosis Rekatama Media tahun 2011. Dalam buku ini membahas mengenai ketimpangan dalam hubungan internasional semakin bertambah tatkala badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kian kehilangan wibawa karena lebih berfungsi untuk menyuarakan kepentingan negara kuat tertentu. Komunikasi internasional juga kurang mendapatkan tempat yang layak sebagaimana mestinya. Kinerja diplomasi negara-negara berkembang yang lebih lemah dengan sendirinya juga terganggu.

Berdasarkan beberapa buku yang dicantumkan di atas baik secara kelompok maupun individu tidak membahas tentang konflik Israel-palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik. Namun dalam beberapa buku yang membahas tentang konflik Israel-palestina, tetapi bukan menjelaskan secara lengkap tentang masalah yang akan ditulis.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi dalam hubungan internasional.
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina.
- 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan sumbangsi pemikiran, baik berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun ilmu keislaman secara khusus dalam melaksanakan pembaharuan dan supremasi hukum di Indonesia.

b. Secara praktis

Adapun kegunaan praktisnya adalah memberi sumbangan langsung dalam pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

Dengan tercapainya tujuan dan maksud penelitian tersebut, setidaknya memberi semangat kepada peneliti khususnya dan umat Islam umumnya akan terlaksananya syariat Islam di muka bumi.

BAB II

TINJAUAN UMUM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN PENGARUHNYA HUBUNGAN DIPLOMASI TERHADAP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Hubungan Diplomasi dalam Hubungan Internasional

Hubungan antar bangsa terbukti sudah ada sejak zaman purbakala. Hal ini dapat ditelusuri lewat peninggalan sejarah, baik berupa tulisan, bangunan, petilasan, baik yang tersimpan dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia. Hubungan antar bangsa tersebut, dilihat dari perspektif kesejarahan atau sudah cukup tua. Hubungan tersebut terkait antar bangsa, kelompok, suku, individu, yang bersifat kesepakatan-kesepakatan longgar dan kebanyakan non formal. Seiring dengan adanya hubungan antar bangsa-bangsa tersebut, berkembang pula kebiasaan-kebiasaan, ataupun aturan-aturan hukum yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa tersebut masuk dalam disiplin hukum internasional.

Hubungan internasional merupakan cabang ilmu sosial yang disiplin paling muda. Usia yang relatif muda membuat hubungan internasional bergantung pada disiplin ilmu lain (ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan filsafat) dalam hal pengembangan metodologi penelitian, tingkat generalisasi konsep atau teori, dan kemampuan memprediksi perilaku subjek rujukan (*referent object*). Hubungan internasional memfokuskan pada aktor negara saja, maka dalam perkembangan selanjutnya hubungan internasional tidak dapat mengesampingkan peran penting

aktor-aktor non-negara (perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan bahkan individu).¹²

Dari bentuk sejarah nampak bahwa hubungan antar individu, kelompok maupun bangsa merupakan bagian dari proses kehidupan manusia atau bagian integral dari kehidupan umat manusia. Proses hubungan antar bangsa berlangsung dan berkembang terus seiring dengan semakin meningkatnya tantangan dan kebutuhan manusia. Sejak abad pertengahan, kecenderungan hubungan yang bersifat internasional semakin nyata, benih dan asas hukum internasional semakin berkembang, terutama di bidang perdagangan dan maritim. Hubungan antar kelompok, suku maupun negara, waktu itu, sering menggunakan cara kekuatan maupun penekanan dari satu suku kepada suku lain, satu negara ke negara yang lainnya. Hal ini masih merupakan bagian dari proses historik, yang berlangsung cukup lama. Masuknya pemikiran di bidang sosial kemasyarakatan serta penemuan-penemuan baru, menyebabkan tata nilai atau susunan dan hubungan kemasyarakatan, sikap maupun pemikiran mengalami perkembangan, perubahan serta kemajuan. Dalam proses yang cukup panjang pula, ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan hubungan antar negara mengalami banyak kemajuan dan perbaikan. Dalam proses menuju hubungan antar bangsa lebih berkeadilan atau bersamaan, sering terjadi konflik yang mengakibatkan perang besar antar negara-negara yang ada.¹³

¹²Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 1

¹³Masyhur Efendi, *Hukum Diplomati Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomati Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993) h. 11-13

Dalam konteks internasional konflik etnik lebih banyak memakan korban dan lebih mengancam keamanan negara. Bahkan konflik etnik tersebut menarik perhatian dan menjadi sorotan dunia. Adapun penyebab terjadinya konflik antar etnik atau suku, yaitu:

1. Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas, suku agama dan kelompok tertentu.
2. Pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara sistematis.
3. Sistem pemerintah yang otoriter dan mengabaikan aspirasi dari akar rumput, sehingga kelompok etnis tertentu kecewa dan tidak puas atas pemerintah.
4. Kebijakan pemerintah yang lebih pro asing daripada memihak kepentingan rakyat.

Konflik etnik/etnis adalah sebuah konflik bersenjata antar kelompok etnik. Konflik tersebut kontras dengan perang saudara di mana hanya sebuah negara atau kelompok etnik tunggal yang bertarung satu sama lain dan peperangan regular di mana dua negara berdaulat atau lebih (baik yang merupakan atau bukan merupakan negara kebangsaan) berkonflik.

Didalam penelitiannya Donald Horowitz berpendapat bahwa konflik etnik bisa terjadi disebabkan oleh tata pemerintahan negara yang otoriter dan memihak pada satu etnik saja, jumlah minoritas etnik dan jumlah mayoritas etnik yang tidak ditimbangi dengan keadilan dalam berpendapat, maka hal itu akan dapat memicu munculnya konflik etnik, militer lebih memihak pada satu kelompok etnis saja,, adanya ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak

yang tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi. Ini semua akan memunculkan konflik etnik, dari skala yang kecil menjadi skala besar, bahkan jika konflik tersebut banyak memakan korban dan menjadi perhatian dunia, maka konflik tersebut masuk kedalam isu global yang mengancam dunia saat ini.¹⁴

a. Pengertian Hubungan Diplomasi

Kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata Yunani “diploun” yang berarti “melipat”. Menurut Nicholson, “Pada masa Kekaisaran Romawi semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar bangsa Romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip kekaisaran menjadi beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus.” Oleh karena itu dirasa perlu untuk memperkerjakan seseorang terlatih untuk mengindeks, menguraikan, dan memeliharanya. Isi surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional, dikenal pada Zaman Pertengahan sebagai *diplomaticus* atau *diplomatique*. Siapa pun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai pemilik *res diplomatique* atau bisnis diplomatik. Dari peristiwa ini lama

¹⁴Aprilia Restuning Tunggal, *Ilmu Hubungan Internasional Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h. 56-59

kelamaan kata “diplomasi” menjadi dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional dan siapa pun yang ikut mengaturnya dianggap sebagai diplomat.¹⁵

Diplomasi suatu kata yang sering kita dengar dan sangat sering dipakai dengan pengertian suatu perbuatan yang cerdas, untuk meloloskan kepentingan atau tujuan tertentu. Atau keahlian meyakinkan seseorang dalam bernegosiasi sehingga setiap permasalahan dapat terselesaikan sementara kepentingan atau tujuan utama tidak dikorbankan. Apapun arti yang diberikan dalam masyarakat maka arti yang sebenarnya tentu bukanlah suatu kecerdikan dan kebohongan.¹⁶

b. Peranan Diplomat Terhadap Hubungan Diplomasi

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesasi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah di mana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintah negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman. Sebagai aktor diplomatik, pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan, peranan itu dimainkan oleh politikus dan negarawan. Seperti

¹⁵S.L. Roy, *Diplomasi* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1995) h. 1&2

¹⁶Sobirin Nurdi, *Diplomasi*, Dikutip dalam situs <http://studi-hi.blogspot.co.id/2010/05/diplomasi.html> (Diakses 13 Mei 2017)

yang dikatakan oleh Clark, diplomat mungkin menentang kebijakan politik negara dia bekerja dan negara yang diwakili, tetapi mereka tetap diharapkan untuk menyampaikan kebijakan tersebut dan mendukung bahkan jika kebijakan tersebut tidak mereka yakini secara pribadi. Sebagai pelaksana kebijakan luar negeri, diplomat menyampaikan detail kebijakan pemerintahan negara lain, menjelaskannya, dan memperoleh dukungan, dan jika dikehendaki, menegosiasikan kesepakatan untuk meningkatkan dan mewujudkannya.

Kondisi ini memungkinkan diplomat untuk menikmati keuntungan dari dua dunia: kegagalan dapat disalahkan kepada kebijakan, sementara keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga dalam mempresentasikan kebijakan tersebut. Peran diplomat juga telah dikiritik karena kurangnya kekuatan nyata dan pengaruh dalam peristiwa-peristiwa internasional. Diplomat dapat memberi nasihat kepada pemerintahnya mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi posisi tawar dan kekuatan sebuah negara. Berdasarkan nasihat-nasihat yang diberikan, pemerintah dapat menetapkan kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan dalam waktu dan kondisi tertentu. Kenyataannya, kebijakan suatu negara juga dapat diterapkan tanpa mendengarkan masukan dari para diplomat.¹⁷

c. Lingkup Kerja Diplomat

Secara garis besar, Konperensi Wina menjabarkan fungsi-fungsi seorang diplomat:

1. *Representing the sending state in the receiving state* (Mewakili negara yang mengirim di negara yang menerima)

¹⁷Sukawarsini Djeantik, *Diplomasi Antar Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h. 4-5

2. *Protecting in the receiving state the interest of the sending state and its national within the limits permitted by international law* (Melindungi kepentingan negara dan bangsa negara pengirim di negara pengirim di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional)
3. *Negotiating with the government of the receiving state* (Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima)
4. *Ascertaining by all lawful means, conditions and developments in the receiving state, and reporting there on the government in the sending state* (Memastikan secara sah menurut hukum, segala kondisi dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim)
5. *Promoting friendly relations between the receiving state and developing their economic, cultural, and scientific relations* (Memajukan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan).¹⁸

Diplomasi sangatlah penting mengingat hanya satu-satunya instrumen politik luar negeri yang paling menghemat biaya dan tanpa harus berjatuhannya korban jiwa. Dan diplomasi ini dinilai sangat bagus untuk mewujudkan sebuah hubungan kerjasama antar Negara kedepannya. Karena dilihat dari segi prakteknya diplomasi merupakan bentuk komunikasi biasa yang hanya saja dibuat sedemikian formal dengan gaya bahasa tertentu dan gesture tubuh tertentu untuk bisa memikat lawan

¹⁸Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*, h. 46

mainnya dalam peraturan diplomasi global ini. Sebuah hubungan antar negara bisa terjadi berkat adanya para diplomat yang menegosiasikan kepentingan negaranya dengan negara lain dan cocok. Oleh karena itu diplomasi benar-benar terbukti sebagai senjata yang paling ampuh untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antar negara tanpa harus terjadinya konflik terbuka yang bisa menelan korban jiwa, dan biayanya juga sangatlah sedikit ketimbang biaya untuk perang.

Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya. Misi-misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat yang berdinasi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan antara negara-negara. Namun, sesungguhnya secara umum munculnya misi-misi diplomatik modern dibedakan dari misi diplomatik temporer baru mulai sejak abad ketujuh belas. Hak-hak, kewajiban-kewajiban dan privilege-privilege perutusan diplomatik terus berkembang sesuai dengan kebiasaan di abad kedelapan belas dan baru pada awal abad kesembilan belas sampai waktunya tercapai kesepakatan bersama mengenai subyek ini, yang seperti akan dilihat, terjadi pada saat berlangsungnya Konferensi Wina tahun 1815.¹⁹

Sebenarnya instrumen politik luar negeri tidak hanya diplomasi saja. Terdapat agen propaganda, intelijen, dan perang salah satunya. Tapi hal ini sudah kuno. Permainan intelijen sudah cukup di pertontonkan pada akhir dekade 1990an.

¹⁹J.G. Strake, *Introduction To International Law* 2 (Butterworth: LexisNexis UK, 1989) trjm. Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 563

Bersamaan dengan berakhirnya perang dingin, isu mengenai perang intelijen menurun hingga tak ada lagi yang peduli mengenai intelijen-intelijen tersebut yang berusaha mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Agen propaganda, merupakan salah satu instrumen politik luar negeri yang sering digunakan pada zaman perang dunia ke dua dan pada saat perang dingin. Propaganda ini bertujuan untuk mencuci mindset seseorang atau paradigma seseorang terhadap apa yang dilihat sebelumnya entah menjadi lebih menyukainya atau menjadi lebih membencinya. Namun, propaganda ini juga tidak murah. Sekarang untuk melancarkan propaganda secara massive membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena propaganda tersebut akan disebar lewat media cetak, atau media elektronik dan hal tersebut yang membuatnya menjadi sangat mahal. Dan perang, merupakan salah satu bentuk unjuk gigi paling kuno untuk mendapatkan sebuah kepentingan nasional dari negara lain atau dari tanah jajahan. Berperang sangatlah merugikan baik pihak yang menyerang ataupun yang bertahan. Baik yang menang ataupun yang kalah. Karena kedua belah pihak sama-sama menderita jatuhnya korban jiwa dan hal tersebut tidaklah bisa diterima begitu saja. Selalu ada kesedihan setiap harinya, lagu-lagu sedih dilantunkan. Dan sangatlah klasik. Ini hanyalah sekilas mengenai instrumen politik luar negeri diluar diplomasi yang tidak efektif membuang waktu dan menghabiskan banyak biaya ketimbang bernegosiasi yang hanya menggunakan keahlian berbicara. Ibarat orang berdagang yang sedang berhadapan dengan pembeli yang menawar harga barang. Harus terjadi sebuah kesepakatan yang adil dimana kedua belah pihak merasakan keuntungan yang sama. Yaitu solusi yang diberikan kepada pihak-pihak yang bernegosiasi tanpa harus ada yang merasa dirugikan sepihak. Hal inilah yang

menjadi tawaran menarik bagi negara-negara di dunia demi meredamnya konflik dan mencegah terjadinya perang dunia ke-3.²⁰

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap perhubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat Internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu saja tidak ditujukan untuk memperbaharui tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada. Meningkatnya kerjasama antar negara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan social maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula. Pengaturan diplomatik khususnya perkembangan kodifikasi hukum diplomatik memang tidak begitu pesat sebelum didirikannya Badan Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak Kongres Wina 1815 telah menetapkan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Kongres Wina pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek, cara-cara secara umum di bidang diplomasi. Perkembangan selanjutnya dalam rangka usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomatik yaitu pada tahun 1927 Liga Bangsa-Bangsa telah membentuk komite ahli yang

²⁰Deasy Sandiani, *Diplomasi Bilateral dan Multilateral Dalam Dinamika Politik Global Pasca Perang Dunia*, Dikutip dalam situs: <http://pengatardiplomasi.blogspot.co.id/2010/06/diplomasi-bilateral-dan-multilateral.html> (Diakses pada Juni 2017).

bertugas membahas perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar negara haruslah diatur secara internasional.²¹

d. Tujuan Diplomasi

Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar-menukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Tujuan persuasive antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya.²²

Kepala negara dan menteri luar negeri mempunyai kewenangan bertindak atas nama negara untuk melakukan hubungan internasional. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mungkin keduanya melaksanakan sendiri kewenangan tersebut. Untuk melakukan hubungan internasional mereka membentuk perwakilan. Seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa pada hakikatnya merupakan diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan antarnegara. Kegiatan diplomasi dilakukan oleh para diplomat, yakni orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Para diplomat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi para warganya sendiri di luar negeri
- 2) Mempresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri
- 3) Menyimpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna

²¹Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik* (Jakarta: Mandar Maju, 1992) h.32&33

²²Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*, h. 14

- 4) Membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain
- 5) Menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan politik internasional²³

e. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional adalah proses interaksi manusia yang terjadi antar bangsa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan ini bisa berupa interaksi antarindividu (misalnya turis, mahasiswa, dan pekerja asing); antarkelompok (misalnya lembaga-lembaga sosial, dan perdagangan); atau hubungan antarnegara (misalnya negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, atau negara-negara yang membentuk organisasi internasional seperti Sejarah PBB atau ASEAN). Hubungan Internasional (hubungan antarbangsa) sendiri terjadi karena dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa semua negara tidak akan

²³Muhammad Malik, *Tujuan Diplomasi*, Dikutip dalam situs: simplenews05.blogspot.co.id/2015/05/tujuan-diplomasi.html?m=1 (Di akses 9 Mei 2017)

mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan selalu membutuhkan negara lain.²⁴

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi tidak selamanya terjalin baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak abad ke-20. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.²⁵

Hukum internasional, sebagaimana yang diketahui saat ini, adalah usaha untuk mengatur hubungan negara-negara Kristen antara satu dengan yang lain. Keadaan ini berlangsung hingga 1856. Turki adalah negara non-Kristen pertama yang mendapat kesempatan untuk memasuki komite bangsa-bangsa. Namun posisinya masih sangat ganjil hingga tahun 1923. Barat saat itu menganggap Turki memiliki peradaban yang *inferior* (terbelakang) dan mereka tidak memperlakukan negara itu sederajat dengan negara-negara Kristen. Hukum internasional modern secara fakta

²⁴Iwak Phitik, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Hubungan Internasional*, Dikutip dalam situs: <http://iwakpithik.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-hubunganinternasional.html> (Di akses pada 9 Mei 2017)

²⁵Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 1

berasal dari Eropa Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika menyimak sejarah mereka yang akan melihat bahwa seluruh karya yang ada dalam hukum internasional dan diplomasi berakar kepada Negara-Kota (*City-State*) Yunani, kemudian diikuti oleh periode Romawi dan secara sangat mengejutkan melompat ke zaman modern saat ini, tanpa menghiraukan masa seribu tahun, (saat Islam menjadi imam peradaban dunia). Dengan anggapan dan penekanan bahwa di “Abad Pertengahan” ada kevakuman dan tidak ada hajat yang mendesak terhadap hukum yang disebut dengan hukum internasional.²⁶

Adapun beberapa pengertian hukum internasional menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Emmerich de Vattel (1714-1767) mengatakan bahwa hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut.
- 2) Hackworth mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara.
- 3) Brierly mengatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan dan asas-asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat negara-negara beradab di dalam hubungan mereka satu sama lainnya.
- 4) Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut: hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas

²⁶Afzal Iqbal, *Diplomacy In Early Islam* (Lahore: Qaumi Press, 2000) trjm. Samson Rahman, *Diplomasi Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000) h. 1

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara:

- a) Negara dengan negara
- b) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

5) Chairul Anwar S.H mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan asas-asas, kebiasaan, dan aturan-aturan yang dipatuhi sebagai kewajiban yang mengikat oleh negara-negara berdaulat dan badan-badan internasional di dalam hubungan mereka satu sama lain dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.²⁷

B. *Profil Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrument pokok berupa Piagam dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadinya telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia.²⁸

1. Lahirnya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Presiden Amerika Serikat semasa Perang Dunia II, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), dan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill (1874-

²⁷Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa* (Jakarta: Djambatan, 1989) h. 1&2

²⁸Sumaryo Suryokusomo, *Oranisasi Internasional* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987) h. 1

1965) dalam suatu pertemuan di Lautan Atlantik pada tahun 1941, merumuskan suatu asas pendirian bersifat umum mengenai tujuan politik sesudah perang. Perumusan itu disebutkan Piagam Atlantik (*Atlantik Charter*) dan di antara isinya yang terpenting ialah:

- a. Pencegahan aneksasi (negara yang menang mengambli setiap bagian dari negara yang kalah, lalu memasukkannya ke dalam wilayahnya. Maka di negara yang dikalah itu akan timbul rasa dendam hasrat menuntut malas dan merebut kembali daerah yang terpaksa dilepaskan itu; pendek kata ditempuhlah politik revanche. Maka aneksasi itu merupakan benih buat perang baru dan itu adalah hal yang harus dicegah).
- b. *Right of selfdermination* (hak untuk menentukan nasi sendiri)
- c. *Freedom of fear*, kebebasan dari ketakutan (terhadap si pemegang kuasa dalam semua bentuk, seperti di bidang Angkatan Bersenjata, kejaksaan, kehakiman, an lain-lain
- d. *Freedom from want*, kebebasan dari kemiskinan harus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, untuk semua lapisan masyarakat hidup yang layak. Sandang pangan yang cukup serta perumahan yang pantas, perbaikan syarat-syarat kerja serta nasib dan kedudukan kaum buruh.
- e. Penolakan dan pencegahan jalan kekerasan untuk menyelesaikan pertikaian internasional.

Atlantik Charter itu kemudian ditandatangani juga oleh negara-negara lain yang turut serta melawan, akhirnya mengalahkan Jerman, Italia, dan Jepang.

Pada tahun 1942 negara-negara sekutu yang berjumlah 26 menandatangani suatu pernyataan yang mengandung janji untuk mengusahkan

perdamaian dunia yang adil dan kekal sehabis perang (*United Nations Declaration*). Makin dirasakan perlunya suatu badan kerjasama internasional buat menjamin perdamaian itu. Lalu negara-negara besar memusyawarahkan hal itu dalam suatu konferensi di Dumbarton Oaks, Washington D.C (1944). Persetujuan tercapai. Disusunlah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) yang pada tahun 1945 setelah diratifikasi oleh Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet serta mayoritas negara-negara pendirinya. Hari 24 Oktober dirayakan tiap tahun sebagai hari PBB.

Sidang-sidang pertama PBB diselenggarakan di London pada tahun 1946. Bendera PBB diterima dan ditetapkan oleh Sidang Umum (*General Assembly*) tahun 1947. Akhirnya selesailah dibangun markas besar yang megah di New York City. Republik Indonesia diterima menjadi anggota ke-60 pada tanggal 26 September 1950. Jumlah anggota PBB pada tahun 1986: 159 (seratus limapuluh sembilan). Negara pendiri berjumlah 51. Jadi dalam 41 tahun tambah dengan 108, kebanyakan bekas daerah jajahan atau daerah perwalian di benua Asia dan Afrika. Sudah barang tentu, bahwa kerjasama antara 159 negara. Ada beberapa negara yang jumlah penduduknya kurang dari satu juta. Timbul berbagai problem: perlu tidaknya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu disusun baru, hak veto, kedudukan negara kecil, pimpinan tunggal, atau kolektif di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggaran belanja meningkat, dan lain sebagainya. Bermunculan masalah-masalah rumit dan pelik yang mesti dihadapinya dan dipecahkannya. Peta dunia dan umat manusia pada tahun 1989 sudah lain dari pada tahun 1945! Namun tujuan pokok Perseikatan Bangsa-Bangsa itu tetap, yaitu:

- 1) Menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang diakibatkan oleh perang
- 2) Menandakan kepercayaan atas hak-hak asasi manusia dan warga negara serta langkah-langkah untuk menegakkannya
- 3) Mengusahakan dan menegakkan keadilan
- 4) Mendorong penjunjungan tinggi hukum internasional
- 5) Membantu usaha-usaha memajukan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup manusia di seluruh dunia.

2. Tujuan dan Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa

a. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

- 1) Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian
- 2) Mempererat pertalian persahabatan antara bangsa-bangsa, yang didasarkan pada hak-hak yang sama dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri
- 3) Mencapai kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan dan perikemanusiaan dan menyempurnakan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi dengan tidak memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama
- 4) Menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut.

b. Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

- 1) Susunan Perserikatan berdasarkan asas persamaan semua anggotanya dalam kedaulatannya
- 2) Semua anggota harus memenuhi dengan jujur kewajiban-kewajiban yang dipikulnya
- 3) Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai
- 4) Semua anggota dalam hubungannya yang internasional harus melenyapkan niat melakukan ancaman atau pemakaian kekerasan terhadap kedaulatan tanah air atau kemerdekaan politik negara yang manapun juga
- 5) Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam tindakan apapun juga
- 6) Susunan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjamin, supaya negara-negara yang bukan anggota PBB berusaha selaras dengan asas-asas ini untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional
- 7) PBB tidak diizinkan mencampuri hal-hal yang pada hakekatnya masuk dalam urusan rumah-tangga negara yang manapun juga.²⁹

Setiap bangsa berhak untuk menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri sesuai dengan kesepakatan yang menjadi wakil rakyat. Dalam hal mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan yang disebabkan oleh intervensi yang dapat memicu umat manusia.

C. Pengaruh Konflik Israel-Palestina dalam Hubungan Diplomasi

²⁹Dosen Universitas Kristen Indonesia, *Kenallah Perserikatan Bangsa-Bangsa* (Cet IV, Jakarta: Erlangga, 1987) h. 5-9

Masyarakat dunia telah menyaksikan berbagai pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Israel atas rakyat Palestina. Apa yang dilakukan Israel tersebut seringkali tidak dapat dikendalikan oleh pihak luar, begitu juga PBB, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Bangsa Palestina telah lebih dari setengah abad hidup dalam tekanan penderitaan karena kemerdekaan, kebebasan, masa depan, tanah, dan kekayaan mereka dirampas oleh Israel yang keberadaan negaranya didukung oleh Deklarasi Balfour. Bagi Palestina jelas tidak mungkin hanya dituntut untuk menerima berbagai syarat yang ditetapkan oleh Israel dan Amerika Serikat atau pihak lainnya, sementara hak-hak mereka diabaikan begitu saja, terus ditindas dan diperlakukan dengan berbagai aksi yang sangat keji dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Cukuplah tengok apa yang terjadi di berbagai wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel sejak meledaknya intifada kedua mulai akhir September 2000. Pembangunan tembok pemisah sepanjang hampir 700 km dari utara ke selatan yang masuk jauh ke dalam wilayah Tepi Barat juga semakin memperburuk kondisi kehidupan yang sudah sangat memprihatinkan dan harus dihadapi oleh rakyat Palestina. Pembangunan tembok pemisah yang dibangun oleh Israel setinggi 8 meter yang membelah wilayah Tepi Barat telah memisahkan ratusan ribu warga Palestina dari keluarga dan tanah mereka. Mereka secara tiba-tiba dikerja pisahkan dari berbagai fasilitas yang sangat mereka perlukan seperti sekolah, rumah sakit, lahan-lah perkebunan dan pertanian, serta tempat-tempat kerja mereka. Mereka pun kehilangan puluhan sumber mata air dan lahan pertanian yang subur yang sangat diperlukan bagi

kehidupan mereka. Masyarakat dunia sudah melihat sejak lama warga Palestina di wilayah pendudukan kehilangan kebebasan mereka untuk bergerak, termasuk bagi pemimpin mereka: Yasser Arafat, hak-hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana lain bagi kehidupan pokok hidup mereka.

Warga Palestina tidak mempunyai rasa aman, bahkan di rumah mereka sendiri, karena pasukan militer Israel memiliki kebebasan penuh untuk menggeledah rumah kediaman mereka, menangkap mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, bahkan membunuh mereka dengan berbagai alas an hasil rekayasa untuk mengelabui mata dunia. Banyak orangtua tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah karena takut mereka tidak dapat kembali ke rumah. Sudah tidak terbilang jumlah warga sipil Palestina tak bersenjata yang dibunuh oleh pasukan Israel, bukan hanya para remaja pelempar batu atau kaum wanita, tapi juga para balita dan anak-anak.³⁰

Berdasarkan legitimasi Resolusi PBB No. 181, pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel. Beberapa waktu kemudian, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel yang kemudian diikuti pengakuan Uni Soviet. Selanjutnya negara baru Israel tersebut berhasil masuk menjadi anggota penuh PBB. Berdirinya Israel adalah merupakan sebuah penyelesaian yang mengandung persoalan dan sebuah persoalan yang mengandung penyelesaian. Pendirian negara Israel tersebut sangat ditentang oleh negara-negara Arab di sekitarnya. Pada tanggal 15 Mei 1948, tentara Mesir, Yordania, Syria, Lebanon,

³⁰N. Hassan Wirayuda, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004) h. 105

dan Irak bergabung dengan bangsa Palestina dan gerilyawan-gerilyawan Arab lainnya melakukan penyerangan terhadap negara Israel.

Perang yang pecah antara kedua belah pihak yang bertikai menyebabkan perang antarpenduduk sipil telah meluas menjadi konflik internasional. Perang antara negara-negara Arab dan Israel pada tahun 1948 disebut juga perang Arab Israel I. lahirlah dua kutub yang saling bermusuhan (bangsa Arab dan Yahudi) di Timur Tengah. Munculnya kekuatan-kekuatan revolusioner semakin menegangkan politik di kawasan tersebut. Kekerasan sebagai cara penolakan terhadap resolusi PBB No. 181 menjadi pilihan negara-negara Arab, karena sulitnya diplomasi dilakukan dan keberpihakan PBB terhadap negara-negara superpower yang mendukung Israel, sehingga menyebabkan Timur Tengah menjadi kawasan yang paling sering dilanda perang besar, seperti perang Arab-Israel yang melibatkan negara lainnya, seperti Mesir, Suriah, dan Lebanon karena Israel menduduki wilayah-wilayah tersebut.³¹

Palestine Liberation Organisation (PLO) adalah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan (yang terpenting ialah Al Fatah), organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, dan guru.

Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai menyingkirkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di perasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO memperoleh pengakuan Liga Arab

³¹Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 134-136.

sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Dan juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.³²

Setelah perang Yom Kippur pada tahun 1973, terdapat perubahan politik di Timur Tengah. Israel dengan bantuan mediasi dengan Amerika Serikat, berupaya menjalin perdamaian dengan negara-negara Arab. Keadaan ini disadari oleh PLO yang secara bertahap mulai meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam perjuangan mereka serta menggantikannya dengan langkah-langkah diplomasi. Tentunya akan sangat tidak menguntungkan bagi PLO apabila masih tetap mempertahankan cara-cara kekerasan, karena hanya akan menyudutkan posisi mereka sendiri. Selain itu negara-negara Arab juga tidak akan menoleransi tindakan tersebut yang dianggap sebagai ancaman terhadap langkah-langkah perdamaian yang mulai dirintis, kemudian mengucilkan bangsa Palestina.

Upaya-upaya diplomasi membuahkan hasil dengan ditetapkannya PLO sebagai wakil resmi bangsa Palestina dalam KTT Arab ke-7 di Rabat, Maroko, pada tanggal 29 Oktober 1974. Tanggal 13 November 1974, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 3232 yang berisi mengenai pemberian hak kemerdekaan dan penentuan nasib bagi bangsa Palestina, dan diperkenankan mengikuti setiap persidangan dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan atas seizin Majelis Umum dan Organisasi-organisasi PBB.³³

³²Abu, *Hamas dan PLO*, <http://vandocrmakaruku.blogspot.co.id/2009/08/hamas-dan-plo.html> (Diakses Agustus 2017)

³³Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 144

Pasca keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB, Israel terus melakukan lobby internasional untuk mencabut kembali keputusan tersebut. Bahkan, Israel pun mengancam PBB untuk mencabut hubungan diplomasi dengan negara-negara yang mendukung Palestina. Amerika Serikat sendiri akan menarik bantuan kemanusiaan senilai 6 juta dolar Amerika yang diberikan secara rutin untuk PBB. Hingga kini, Israel ketakutan apabila upaya rekonsiliasi yang ditengahi oleh Perancis untuk perdamaian Israel-Palestina sukses digelar tahun ini. Rencana perdamaian yang juga didukung oleh pihak Barrack Obama dan beberapa negara Eropa ini, membuat Israel semakin jatuh dimata Internasional. Terbukti keputusan DK PBB terkait permukiman Yahudi menjadi catatan penting dalam sejarah.³⁴

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggelar rapat kabinet dengan sejumlah menteri-nya menyusul bentrokan di Yerusalem dan Tepi Barat. Palestina menyatakan akan menghentikan hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya tiga warga Palestina tewas dan ratusan lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam bentrokan di Yerusalem dan Tepi Barat usai ibadah Shalat Jumat. Ketegangan dipicu pemasangan sistem pengamanan yang membatasi akses warga muslim ke Masjid Al-Aqsa oleh pihak keamanan Israel. Israel beralasan pemasangan detektor logam itu demi keamanan. Sedangkan Palestina menuding aksi sepihak itu taktik Israel untuk menguasai tempat suci bagi warga muslim.³⁵

³⁴Republika, Israel Cabut Hubungan Diplomasi Negara Yang Membantu Palestina, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/01/08/ojfyga396-israel-cabut-hubungan-diplomatik-negaranegara-yang-membantu-palestina> (Diakses pada 24 Mei 2017)

³⁵Liputan 6, *Palestina Hentikan Hubungan Diplomati dengan Isreal*, Dikutip dalam situs: <http://news.liputan6.com/read/3032202/palestina-hentikan-hubungan-diplomatik-dengan-israel> (Diakses pada 23 Juli 2017)

Keengganan Israel untuk menyerahkan daerah yang didudukinya pada perang tahun 1967 kepada pihak Palestina sesuai Resolusi PBB No. 242 dan 348 terbukti semakin menyadarkan rakyat Palestina bahwa jalan perundingan dengan Israel untuk mendapatkan kembali daerah yang diduduki Israel merupakan jalan sia-sia. Pada akhirnya, sikap Israel tersebut terbukti semakin memperkuat ortodoksi di pihak Palestina dan banyak kaum muslim di berbagai dunia Islam yang meyakini kebenaran jalan jihad (perang) untuk menghadapi Israel. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, bukan mustahil akan terjadi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, bahkan dapat menyeret konflik Yahudi dan Muslim di berbagai belahan dunia.³⁶



³⁶Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 199

BAB III

PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

A. Sejarah Konflik Israel-Palestina

Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama penyempurna dari segala ajaran Ilahiah. Ajaran dan peraturan Islam telah terbukti membawa kedamaian dan keadilan bagi umat manusia, tanpa kecuali. Namun, keberhasilan Islam ini tidak membuat sebagian orang berhenti mengingkari keagungannya. Bahkan keunggulan tersebut justru memicu rasa dengki dan dendam yang membara pada kaum yang ingkar, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen yang banyak bermukim di belahan barat bumi.

Kebencian yang luar biasa telah menjadikan masyarakat barat, yang dimotori oleh Amerika Serikat, mencari berbagai cara untuk menghancurkan Islam dan ummatnya. Penguasa barat seluruh agennya berusaha sekuat tenaga agar kaum Muslimin ragu kepada agamanya seraya berusaha menyebarkan misi agama mereka. Barat juga merendahkan keagungan sejarah Islam dan memaksakan pemikiran berat serta peradabannya kepada dunia Islam.³⁷

Palestina adalah tanah yang diciptakan sejarah sekaligus menciptakan sejarah. Sebagaimana yang dikatakan Syisru tentang Athena, “Ketika kita menjejakkan kaki, maka kita tengah berjalan di atas sejarah”. Hal itu disebabkan letak geografis, sejarah, peradaban, dan kemajuan spiritual yang dimiliki Palestina. Banyak nabi yang hidup di dalamnya. Dan semua agama samawi monoteis bergelayutan di langitnya. Palestina dan sekitarnya adalah negeri yang diberkati Allah. Ia adalah tanah yang disucikan. Allah menjadikannya sebagai

³⁷Irena Handono, *Menyingkap Fitnah dan Teror* (Bekasi: Gerbang Publishing, 2008) h. 1

negeri akidah dan iman, arena pertempuran dan jihad, tanah ikatan dan kesyahidan, tanah kepastian dan keputusan. Palestina adalah tanah *mahsyar*. Disanalah manusia berkumpul dari segala penjuru dunia untuk mendengarkan terompet sangkakala dan kemudian mati. Dengan demikian, tanah yang diberkati ini adalah tanah yang menyaksikan detik-detik terakhir dengan nafas manusia di dunia ini.³⁸

Panggung sejarah perjanjian lama yang terbentang antara Teluk Persia dan delta Sungai Nil, dipisahkan dari wilayah sekelilingnya oleh batas alami yang bagi penduduk wilayah itu menjadi halangan untuk keluar dan bagi penyerbu dari luar, halangan untuk masuk. Di sebelah timur menjulang pegunungan Zagros yang tingginya hampir 5000 meter, memisahkan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Di sebelah utara, pegunungan yang sama memanjang ke arah barat. Di Asia Kecil pegunungan itu membelok ke arah selatan dan menjadi pegunungan Taurus yang tingginya masih sampai sekitar 3000 meter. Di pojok tenggara Asia Kecil terdapat celah Sisilia yang memotong pegunungan itu. Celah ini merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah Bulan Sabit Subur. Celah inilah yang dilewati oleh Koresy, Aleksander, Pompeius dan Paulus.³⁹

Secara fisik geografis, kota Yerusalem merupakan salah satu wilayah yang indah dan subur di Palestina yang terletak di daerah pegunungan. Selain kota Yerusalem, di wilayah Palestina lainnya terdapat kota-kota Bethlehem, Hebron, Nablus, dan Nazareth yang banyak menghasilkan berbagai macam buah-buahan, seperti aneka jeruk dan lemon, zaitun (*olive*), buah tin (*fig*), anggur, delima, mangga, almond, dan berbagai buah-buahan lainnya. Di antara

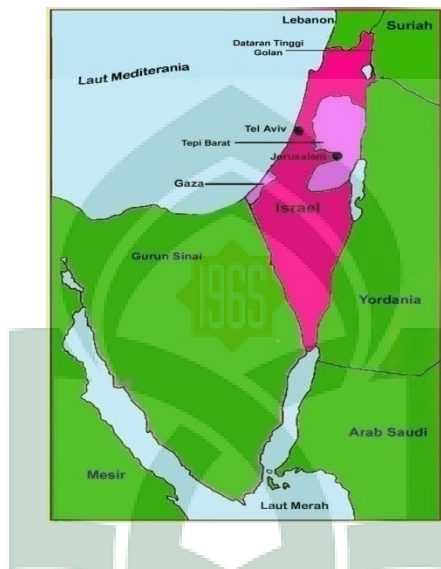
³⁸Mahir Ahmad Agha, *Yahudi Catatan Hitam Sejarah*, h. 6

³⁹I. Suharyo Pr, *Mengenal Alam Hidup Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 1993) h. 10

kota-kota tersebut juga merupakan kota-kota suci bagi umat Yahudi dan Nasrani.⁴⁰

Gambar Ilustrasi I

Peta Wilayah Israel-Palestina



Palestina ialah suatu wilayah yang terletak di antara tepi Sungai Yordan mencapai sebelah Selatan dari Laut Mati hingga muara Teluk Aqabah. Kawasan ini berbentuk segitiga; bagian kepala menuju ke Selatan dan ekornya ke Utara. Pada bagian kepala bertemu dengan ujung Teluk Aqabah, sedangkan bagian ekor memanjang dari Laut Mati hingga Laut Tengah. Wilayah Palestina berada di ujung sebelah Barat dari Benua Asia, membentang pada garis 15° - 34° dan 40° - 35° Lintang Timur serta memanjang pada garis 30° - 29° dan 15° - 33° Lintang Utara.

Kawasan ini bukan merupakan kawasan yang subur dengan hasil alam yang melimpah. Hasil kekayaan alam yang ada hanyalah sebatas logam yang

⁴⁰N. Hassan Wirayuda, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, h. 109

terpendam di dasar laut mati. Adapun hasil pertaniannya, di antaranya ialah jeruk limau, biji-bijian, serta zaitun. Kawasan ini menjadi penting bukan karena hasil kekayaan alamnya, melainkan lebih karena kedudukannya yang strategis. Letak wilayah ini menghubungkan tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, serta menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Wilayah Palestina berbatasan langsung dengan Lebanon, Suriah, Yordania, Arab Saudi, serta Mesir, yang artinya menghubungkan negara-negara Arab di Benua Asia dengan negara-negara Arab di kawasan Benua Afrika.

Wilayah Palestina terkenal dengan kota Jerusalem sebagai kota suci, sebagai tempat yang di klaim oleh umat Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai kota suci agama mereka dan selalu menjadi ajang perebutan kekuasaan. Yerusalem yang di klaim menjadi pusat pemerintahan Palestina dan Israel sekarang ini telah dihuni oleh bangsa Yebus dan Kanaan sejak sekitar tahun 1800 SM.⁴¹

Palestina tidak pernah sepi dari penduduk Yahudi pribumi pada 1800, populasi itu membentuk sebagian sangat kecil dari jumlah keseluruhannya sekitar 2,5 persen berhadapan dengan lebih dari 97 persen orang Arab. Pada tahun 1880-an, ketika migrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina dimulai dengan sungguh-sungguh, perbandingan orang Yahudi dengan Arab naik menjadi 6 persen dari total. Sekitar tiga puluh ribu pindah ke Palestina, dan perbandingan itu berubah lagi. Namun para imigran pertama ini adalah intelektual perkotaan yang sangat idealis, yang membayangkan diri mereka sebagai petani Palestina, meskipun mereka tidak bias membedakan seko dari cangkul. Sebagian besar dari

⁴¹Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 105-108

mereka kembali ke eropa, dan aliyah pertama pun habis. Seperti itulah keadaannya saat Perang Dunia I menjelang.⁴²

Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas sejak 1940-an. Agresi Militer Israel terakhir yang dilancarkan sejak 26 Desember 2008 pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari konflik Israel-Palestina sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kronologi konflik Israel-Palestina dapat dipahami sebagaimana penjelasan berikut:

Table 1
Tentang Sejarah Konflik Israel-Palestina

Tahun	Peristiwa	Deskripsi
1917	Deklarasi Balfour	2 November 1917 Inggris memenangkan Deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina.
1922	Mandat Palestina	
1936-1939	Revolusi Arab	Pimpinan Amin al Husein yang menyebabkan tidak kurang 5000 warga Arab terbunuh
1947	Rencana pembagian wilayah oleh PBB	29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948 dengan pemecahan wilayah mandat

⁴²Tamim Ansary, *Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes* (United States: Public Affairs, 2009) trjm. Yuliani Liputo, *Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam* (Jakarta: Zaman, 2012) h. 455

1948	Deklarasi Negara Israel	Israel diproklamirkan pada tanggal 14 Mei 1948, sehari kemudian langsung diserang oleh tentara dari Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Israel berhasil memenangkan peperangan dan merebut + 70% dari luas total wilayah mandat PBB Britania Raya.
1949	Persetujuan gencatan senjata	3 April 1949, Israel dan Arab sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Israel mendapat kelebihan 50 persen lebih banyak dari yang diputuskan rencana pemisahan PBB
1956	Perang Suez	29 Oktober 1965, Krisis Suez, sebuah serangan militer terhadap Mesir dilakukan oleh Britania Raya, Perancis dan Israel.
1964	Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdiri	Mei 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) resmi berdiri, tujuannya untuk menghancurkan Israel.
1967	Perang enam hari	Dikenal dengan perang Arab-Israel 1967, merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab: Mesir, Yordania dan Suriah, yang mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 menit.
	Resolusi Khartoum	Sebuah pertemuan 8 pemimpin negara Arab pada tanggal 1 September 1967 karena terjadinya perang enam hari. Resolusi ini berlanjut ke perang Yom Kippur tahun 1973.
1968	Palestina menuntut pembekuan Israel	Perjanjian Nasional Palestina dibuat, dan secara resmi Palestina menuntut pembekuan Israel.
1970	War of Attrition	Setelah perang enam hari (5-10 Juni 1967), terjadi insiden serius di Terusan Suez. Tembakan pertama dilepaskan 1 Juli 1967,

		ketika pasukan Mesir menyerang patroli Israel, dan ini merupakan awal dari perang War of Attrition.
1973	Perang Yom Kippur	Dikenal juga dengan Perang Ramadhan pada tanggal 6-26 Oktober 1973 karena bertepatan dengan bulan ramadhan. Perang ini merupakan perang antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah, terjadi pada hari raya Yom Kipur, hari raya yang paling besar dalam tradisi orang-orang Yahudi.

1978	Kesepakatan Camp David	Ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di Timur Tengah. Jimmy Carter (Presiden Amerika Serikat) memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin.
1982	Perang Libanon	Perang antara Israel dan Libanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan bersenjata Israel menyerang Libanon Selatan.
1990-1991	Perang Teluk	
1993	Kesepakatan damai antara Palestina dan Israel	13 September 1993, Israel dan PLO sepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Pertemuan Yaser Arafat dan Israel Yitzhak Rabin berhasil melahirkan kesepakatan OSLO. Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang bisa memerintah di kedua wilayah. Arafat mengakui hak negara Israel untuk eksis secara aman dan damai.

1999-1997	Kerusuhan terowongan Al Aqsha	Israel sengaja membuka terowongan Masjid al Aqsha untuk memikat para turis dan membahayakan fondasi mesjid bersejarah, pertempuran berlangsung beberapa hari. Israel menarik pasukannya dari Hebron, Tepi Barat
1998	Perjanjian Wye River	Oktober 1998, Perjanjian Wye River yang berisi penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal.
2000	KTT Camp David	
2002		Israel membangun tembok pertahanan di tepi Barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina
2004		Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya
2005	Mahmud Abbas terpilih menjadi Presiden	9 Januari 2005, Mahmud Abbas dari al Fatah terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina menggantikan Yaser Arafat yang wafat pada 11 November 2004
		Juni 2005, pertemuan Mahmud Abbas dan Ariel Sharon di Yerusalem. Mahmud Abbas mengulur Jadwal Pemilu karena mengkhawatirkan kemenangan diraih pihak Hamas
		Agustus 2005, Israel hengkang dari pemukiman Gaza dan empat wilayah pemukiman di Tepi Barat
2006	Hamas memenangkan Pemilu	Januari 2006, Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi dominasi fatah selama 40 tahun
2008		Januari-Juli, ketegangan meningkat di Gaza.

	Agresi militer Israel ke Gaza	Israel memutus suplai listrik dan gas, Hamas dituding tidak mampu mengendalikan kekerasan
		November 2008, Hamas batal ikut serta dalam pertemuan univikasi Palestina yang dilaksanakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di wilayah Israel.
		26 Desember 2008, Agresi Israel ke Jalur Gaza. Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas.
2011	Palestina mendaftarkan diri menjadi anggota PBB serta menjadi anggota UNESCO	Palestina mendaftarkan diri menjadi anggota PBB akan tetapi gagal karena diancam <i>veto</i> oleh AS. Palestina berhasil menjadi anggota UNESCO.

Setelah mengalami berbagai gejolak hampir enam dekade lamanya kini wilayah Israel dan Palestina mengalami perubahan yang signifikan.⁴³

B. Faktor penyebab terjadinya konflik Israel-Palestina

Israel mendasarkan klaim-klaimnya untuk mendirikan sebuah negara untuk mendirikan sebuah negara di Palestina sumber utama yaitu warisan perjanjian lama dari Kitab Injil yang di dalamnya Kitab Kejadian 15:18 “Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim melalui firman, ‘Untuk keturunanmu Aku berikan tanah ini, dari sungai Mesir hingga sungai besar, sungai Efrat.’” Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada 1917, dan pembagian Palestina menjadi Arab dan negara Yahudi yang direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1947.⁴⁴

⁴³Fajar, *Konflik Palestina dan Israel: Agama, Tanah Air dan Politik*, Di kutip dalam situs <https://ekomarhaendy.files.wordpress.com/2011/02/analisis-sosial-konflik-israel-palestina.pdf> (Diakses pada 20 Juni 2017)

⁴⁴Paul Findley, *Deliberate Deceptions: Facing The Facts About The U.S-Israeli Relationship* (New York: Lawrence Hill Books, 1993) trjm. Rahmani Astuti, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel* (Bandung: Mizan, 1995) h. 23

Masalah Yerusalem adalah salah satu titik permasalahan pokok dalam sengketa antara Israel dengan Palestina. Sejak awal, telah berkembang aspirasi rakyat Palestina agar menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibukota Negara Palestina di kemudian hari. Hal ini berkaitan dengan aspirasi pendudukan militer Israel dan pelaksanaan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi bangsa Palestina. Ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional. Di Palestina sendiri, ada ketakutan di kalangan penduduk bahwa Israel akan mengubah *status quo* di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ditambah lagi dengan peraturan otoritas militer Israel yang ketat pada jalur masuk ke Masjid Al-Aqsa dan hanya memberikan izin bagi penduduk Palestina yang berusia lanjut untuk bersembahyang di dalam masjid, sedangkan generasi mudanya bersembahyang di luar masjid. Pemutusan akses dan perilaku diskriminatif ini telah ikut memicu ketegangan di Yerusalem dan menunjukkan situasi yang masih jauh dari perdamaian. Perdamaian di Yerusalem sebenarnya menyangkut prinsip hidup saling berdampingan secara damai antara Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat yang merupakan bagian dari formula penyelesaian dua negara antara Israel dan Palestina.⁴⁵

Ada tiga alasan dasar yang menjadi perebutan kota suci Yerusalem:

1. Alasan Ekonomi

Presiden Bill Clinton sudah menjelaskan hal ini di Gedung Putih dalam wawancaranya dengan koran Otto Citizen Canada pada tanggal 1 Desember 2000, bahwasanya “kota Yerusalem akan menjadi tempat tujuan utama para turis internasional dan para pelancong dunia dalam sejarah keparawisataan” dan karenanya

⁴⁵Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina* (Jakarta: LP3ES, 2017) h. 13

pula ia berusaha merayu Presiden Yasir Arafat agar mau memindahkan masjid Al-Aqsho dari sana.

Pada realitasnya, sesungguhnya musuh Israel dengan usaha keras mereka untuk menguasai kota Yerusalem dan kota Yerusalem yang lama dengan seluruh masjid dan gereja yang ada di dalamnya, mereka ingin menguasai dan menjadi koordinator tunggal untuk mengurus para Haji dan Kristiani ke sana dan mereka pula yang mengurus kunjungan umat Islam untuk menyempurnakan Hajinya. Dan ini akan mendatangkan pendapatan devisa yang sangat besar yang mereka dapat dari kunjungan umat Kristiani dan umat Islam, bukan kunjungan para turis internasional seperti yang diungkapkan Bill Clinton.

2. Alasan Politis

Alasan ini terealisasi lewat program mereka untuk menjadikan kota Yerusalem lama yang memiliki posisi yang strategis dan sejarah panjang menjadi Ibu Kota Negara yang Abadi menurut keyakinan mereka, yang dari sanalah mereka akan menguasai seluruh wilayah sekitarnya.

Bariz, seorang politisi Libanon pernah bercerita ketika ada pertemuan di PBB setelah Zionis Israel mencaplok Libanon pada tahun 1982, ketika Perdana Menteri Israel pada waktu itu Manahan Begin, mengundang mantan Perdana Menteri Libanon Kamil Syam'un untuk mengunjungi kota suci Yerusalem, (seperti diceritakan oleh Kamil Syam'un dalam otobiografinya dalam bahasa Prancis) Manahan Begin berperilaku seolah-olah ia Raja Sulaiman sedangkan Kamil Syam'un diberlakukan seolah-olah salah satu raja Al-guwaiyim (buta huruf /bodoh) di masa mendatang.

Yang datang dari kota Shuur untuk menyembahkan rasa tunduk dan loyal kepada raja Israel yang baru.

Penggalan cerita ini sudah cukup sebagai simulasi untuk menjelaskan alasan yang sangat esensi yang terwujud lewat aturan yang ada di Timur Tengah. Sebuah aturan dan undang-undang yang ingin diberlakukan secara paksa oleh Amerika Serikat kepada seluruh wilayah itu, dengan kerja keras untuk menyamakan aturan bagi warga Arab bagaimanapun caranya.

3. Alasan Historis

Dengan alasan perang budaya, maka merebut kota suci Jerusalem dan menguasai seluruh barang bersejarah umat Islam dan Kristen di kota itu merupakan kemenangan budaya Barat atas budaya Arab Islam, dengan keunggulan dan hegemoni politik Barat mengajak sekutunya untuk mengusik dendam sejarah masa lalu yang berkobar dalam jiwa dan dada mereka atas budaya Arab Islam yang mengalahkan mereka dalam perang orang-orang Barat delapan abad yang lalu.⁴⁶

Tampaknya tidak dapat disangkal bahwa pengalaman relegius umat Kristen awal dan pengungkapannya dalam tulisan-tulisan perjanjian baru dipengaruhi oleh dunia Yunani. Orang-orang Kristen hidup dalam sejarah dunia, yang ditandai oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi; dipengaruhi oleh usaha-usaha manusia untuk menjawab masalah-masalah kehidupan filsafat dan agama. Semua unsur itu dapat dikatakan “menguntungkan” agama Kristen: bahasa umum yang dipakai di wilayah yang luas, kemungkinan untuk bergerak

⁴⁶Rian Donok, *Konflik Palestina dengan Israel dan Pengaruhnya Terhadap Dunia*, Dikutip dalam situs <https://riandonok.blogspot.co.id/2015/04/konflik-palestina-dengan-israel-dan.html> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017)

menjelajah wilayah-wilayah, sistem-sistem filsafat dan agama primitif yang berperan menegakkan nilai-nilai moral. Dengan menekankan pengaruh-pengaruh dunia Yunani yang ikut membentuk Kristianisme, tidak ada yang mempertanyakan kekhususan tanggapan yang diberikan oleh Kristianisme terhadap tawaran Allah dalam sejarah. Pengaruh-pengaruh ini semakin menjelaskan ciri inkarnasi iman Kristen, sebagai kelanjutan inkarnasi Yesus sendiri, Sang Sabda yang menjadi daging. Pola seperti ini akan terulang kembali dalam sejarah Gereja, yang bergerak dari Yerusalem sampai ke ujung bumi.⁴⁷

Sekelompok orang Yahudi yang telah ditimpahkan kepada mereka nista dan kehinaan serta kemurkaan Allah SWT, dapat mengalahkan berjuta-juta bangsa Arab dan umat Islam. Dan mereka berhasil merebut jantung kawasan Arab dan Islam yaitu di tanah Palestina dari tangan mereka untuk kemudian mendirikan sebuah negara Zionis. Zionis adalah negara yang berdiri di atas pengkhianatan dan kebencian buta wrisan dari nenek moyang mereka terhadap setiap orang Arab muslim, bahkan setiap orang non Yahudi.

Keberadaan jutaan umat Islam diperanyakan saat itu. Jika saja tiap satu orang saja dari mereka memegang sebuah batu kemudian melemparkan kepada kelompok Yahudi niscaya mereka akan lenyap di muka bumi ini. Umat Islam kala itu yang telah disabdakan Rasulullah, “Akan tetapi kalian banyak seperti banyaknya buih di lautan.” Setelah mengetahui pengkhianatan-pengkhianatan keji yang terjadi pada saat itu, keheranan terhadap konflik menjadi sirna dan terhenti. Tetapi darah luka yang menyayat hati tidaklah karena hal tersebut. Sebagian bangsa Arab di Palestina telah berkhianat kepada negara mereka

⁴⁷Sean Freyne, *The World of the New Testament* (Wilmington: Michael Glazier Inc, 1980) trjm. I. Suharyo Pr, *Dunia Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 1991) h. 38

dengan menjual tanah mereka kepada bangsa Yahudi serta bekerja sama dengan mereka yang berakibat pada hilangnya Palestina. Meskipun bangsa Arab yang berada di Palestina telah mendapatkan kekayaan yang melimpah dari hasil penjualan tanah mereka kepada orang-orang Yahudi dan juga hasil dari uang sewa yang berasal dari mereka, dan walaupun saat itu beribu-ribu orang bekerja di pemukiman Yahudi dan berates-rarus orang yang bekerja di pabrik-pabrik Yahudi. Akan tetapi pemimpin Palestina tetap bersikap bermusuhan terhadap bangsa Yahudi. Sebagaimana pemilik tanah pertanian dan bangunan mendapatkan kekayaan dari penjualan tanah-tanah tersebut kepada bangsa Yahudi, ditambah lagi kekayaan yang didapat orang Arab Palestina dari penjualan sisa dari hasil panen pertanian dan perkebunan mereka serta penggunaan tenaga kerja dari bangsa Arab Palestina di lahan pertanian dan industri Yahudi. Tidak ada orang Arab di sana kecuali orang Palestina. Barangsiapa yang menjual tanahnya seakan-akan dia telah menjual kehormatan dan harga dirinya. Apalagi jika dijual kepada musuh agama dan tanah airnya. Jika itu terjadi, maka dia telah melakukan pengkhianatan yang tidak terampuni bangsa dan tanah airnya sendiri. Tidak diperbolehkan bagi orang yang mempunyai logika untuk menjual tanahnya kecuali kepada orang yang seagama dan setanah air dengan membeli tanah lainnya yang lebih baik.

Bangsa Yahudi telah memberi umpan yang dimakan mentah-mentah oleh sebagian orang Palestina yang telah melepaskan tanah air mereka serta menyeret mereka sendiri beserta negara-negara Arab lainnya terutama Mesir ke dalam bahaya yang berlangsung sampai sekarang. Bangsa Arab lainnya, khusus Mesir harus membayar mahal dengan jiwa dan harta benda mereka. Mesir juga telah

kehilangan para pemuda pilihan serta pahlawan terbaiknya. Sampai sekarang Mesir menanggung hutang, kelaparan, kemiskinan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya akibat dari pengkhianatan yang dilakukan sebagian bangsa Palestina yang telah menjual tanah mereka, yang juga berarti telah menjual kehormatan dan diri mereka kepada musuh mereka, bangsa Yahudi.⁴⁸

Blokade yang dilakukan Israel selama lebih tujuh tahun telah memaksa warga Palestina yang tinggal di Gaza hidup dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Blokade juga berdampak pada pembatasan pembangunan sektor pertanian dan perikanan Palestina dan mengancam kehidupan para petani dan nelayan Palestina. UNWRA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) mencatat bahwa pembatasan impor dan ekspor juga menyebabkan pemenuhan hak pembangunan ekonomi untuk warga Palestina di Gaza terabaikan. Situasi ini bahkan menyeret Gaza kembali ke kondisi kehancuran yang mengakibatkan 80 persen dari warganya bergantung kepada bantuan dan belas kasihan pihak lain. Sementara itu, pemadaman listrik dan banjir di musim dingin yang terjadi secara periodik telah memperburuk kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebelum terjadi eskalasi kekerasan pada musim panas tahun 2014, warga Palestina di Gaza telah mengalami dua konflik dengan Israel, yakni pada tahun 2008 dan 2009, dan sekali lagi pada tahun 2012, yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Israel mungkin telah menarik tentaranya dari Gaza pada tahun 2005. Namun demikian, Israel tetap menjadi negara penjajah dengan kekerasan penuh.

⁴⁸Sa'ad Karim Al-Fiqi, *Khiyanaat Hazzat Al-Tarikh Al-Islami* (Dar Al-Alamiyyah Iin Nasyr wat Tauzi: Kairo) trjm. Muhyiddin Mas Rida, *Pengkhianat-Pengkhianat Dalam Sejarah Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 289

Menurut OCHCHR, di putaran terakhir kekerasan yang terjadi antara Israel di satu sisi, dan Hamas serta kelompok bersenjata Palestina lainnya di sisi lain, antara 7 Juli hingga 26 Agustus 2014 (operasi “*Protective Edge*”), tercatat 2.256 korban jiwa di pihak Palestina, di mana di antaranya 1.563 adalah warga sipil termasuk 538 anak-anak. Angka ini melampaui jumlah gabungan korban dari dua konflik sebelumnya di Gaza. Sedangkan di pihak Israel, 66 tentara dan lima warga sipil dilaporkan tewas.⁴⁹

Para pembela HAM terkemuka yang berbasis di Gaza juga menyampaikan, “tidak pernah dalam hidup kami melihat kerusakan yang sedahsyat ini”, merujuk kepada beberapa lingkungan duan daerah perkotaan yang hancur terkena serangan seperti Shuja’iya, Khuza’a dan Rafah. Para pekerja kemanusiaan yang berpengalaman bahkan menyatakan bahwa konflik di Gaza merupakan konflik terburuk diseluruh dunia dan apa yang mereka lihat di Gaza adalah “sangat mengejutkan”. Dalam satu insiden di sebuah sekolah UNWRA di Jabaliya, pada 30 Juli 2014, serangan Israel di duga telah menewaskan 16 orang dan melukai 100 korban lainnya. Sebenarnya, UNWRA telah member tahu pihak berwenang militer Israel tentang 17 lokasi sekolah mereka termasuk salah satu lokasi di antaranya yang diinformasikan kepada pihak Israel hanya beberapa jam sebelum penyerangan terjadi. Terkait hal tersebut, pada November 2014, Sekretaris-Jendral PBB membentuk *Board of Inquiry* (Dewan Penyelidik) untuk meninjau dan menyelidiki sejumlah insiden tertentu di mana kematian, cedera, kerusakan terjadi di bangunan milik PBB. Selain itu, Israel juga telah membentuk mekanisme penilaian fakta internal dan

⁴⁹Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 95

telah melakukan sejumlah penyelidikan kasus criminal atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Akan tetapi, langkah Israel ini dinilai masih belum dapat menghadirkan unsure akuntabilitas di dalam prosesnya.⁵⁰

Blokade yang diberlakukan oleh Israel pada tahun 2007 menimbulkan dampak negative pada upaya pemenuhan HAM warga Palestina di Gaza, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan kebebasan bergerak. Pernyataan yang dibuat oleh Pemerintah Israel terkait kebijakan blokade disebut menyebutkan bahwa kebijakan blokade disebabkan oleh kontrol Hamas atas Gaza pasca berlangsungnya pemilu dan juga disebabkan oleh tebaran roket-roket yang ditembakkan dari Gaza ke Israel. Dengan mempertahankan aksi blokade tersebut, Israel telah memicu peningkatan ancaman terhadap keamanan di wilayah pendudukan. Blokade juga sangat membatasi impor dan ekspor luar negeri serta transfer barang-barang antara Tepi Barat dan Gaza dan juga secara eksplisit ditujukan untuk “mengurangi pasokan bahan bakar dan listrik”. Selain itu, Israel juga terus memperketat pembatasan pergerakan warga Palestina baik akses masuk maupun keluar dari Gaza. Blokade merupakan bentuk hukuman kolektif yang berlaku atas warga Gaza dan bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Jenewa IV. Selain itu, dari segi keamanan Israel dan Palestina, sementara blokade berlangsung, terjadi tiga eskalasi permusuhan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa tujuan utama dari blokade adalah untuk melanggar pemenuhan HAM penduduk Gaza dan untuk menambah penderitaan mereka. Maka, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kebijakan blokade termasuk argument berdasarkan alasan keamanan.⁵¹

⁵⁰Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 97

⁵¹Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 116

Blokade bertentangan dengan hukum internasional dan memperparah kondisi kemanusiaan di Gaza. Untuk itu, kebijakan blokade seharusnya segera diakhiri. Langkah-langkah lain yang sesuai dengan kewajiban Israel di bawah hukum internasional seperti pengecekan barang-barang harus dilakukan oleh Israel untuk mengatasi masalah keamanan tanpa perlu melanggar hak-hak asasi warga Palestina dan mengancam keberlangsungan pembangunan ekonomi di Gaza seperti yang diamanatkan oleh Konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan (*the United Nations Conference on Trade and Development*). Dalam memberlakukan kebijakan blokade, Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka berusaha untuk memperhitungkan “aspek kemanusiaan yang relevan di Jalur Gaza” dan “untuk menghindari krisis kemanusiaan”. Namun, fakta menyatakan bahwa blokade adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza di mana telah banyak warga Gaza yang mengungsi dan hidup tanpa rumah. Blokade juga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik hingga 12-16 jam sehari. Lebih dari 90 persen air tidak layak konsumsi bagi manusia, diperkirakan 80 persen dari seluruh penduduk Gaza adalah penerima bantuan dan angka kemiskinan mencapai 39 persen, semua itu adalah akibat dari pemberlakuan blokade oleh Israel. Langkah yang dilakukan oleh Israel dan Palestina untuk mengkoordinasikan upaya-upaya ke arah rekonstruksi tidaklah cukup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Israel lah yang seharusnya memiliki peran utama dalam mengakhiri kondisi memprihatinkan tersebut dengan mengakhiri kebijakan blokade.⁵²

⁵²Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 117

C. Dampak Konflik Israel-Palestina

Di sebelah Timur dan Barat mengalami penghancuran oleh Hulago dan Spanyol Kristen, ummat Islam sebelah Tengah mengalami serangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus. Suatu serangan yang kemudian dikenal dengan sebutan perang Salib, yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak, dari tangan kaum Muslimin. Terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan di pantai Timur Laut Tengah, peristiwa yang merusak hubungan antara dunia Timur dan dunia Barat. Dengan menggunakan semboyan “begitulah kehendak Tuhan” kaum Kristen Eropa menyerbu. Penyerbuan yang berjalan selama dua abad lamanya memakan korban baik jiwa maupun harta dan kebudayaan yang tidak sedikit banyaknya. Dengan congkaknya Godfay, kepala negara Kristen yang menduduki Palestina, berkirim surat kepada Paus, diantaranya ia berkata “sesungguhnya kuda kami mengarungi lautan darah dari orang-orang Timur sampai ke lutut tingginya di hadapan Haikal Sulaiman”.

Perang Salib ini digerakkan oleh seorang pendeta Peter dari Perancis, tetapi kemudian didukung oleh Paus di Vatikan, oleh raja Kristen di Eropa dan oleh kepala Kristen Ortodox yang berkedudukan di Konstantinopel. Paus Urbanus II mengadakan pidato yang berapi-api di Clermont Perancis pada tanggal 26 November 1095 yang menurut penilaian Philip K. Hitti “kemungkinan sekali pidato yang paling berkesan di dalam sejarah”. Kumandang pidato Paus situ menggema di seluruh Eropa, di segala negara Kristen, mempersiapkan tentara yang lengkap persenjataannya untuk pergi

berperang merebut Palestina. Dari sinilah bermula suatu penyerbuan Barat Kristen ke dunia Islam yang berjalan selama 200 tahun lamanya dari mulai 1095-1293 M dengan 8 kali penyerbuan.⁵³

Tahun-tahun setelah terjadinya perang dingin merupakan saksi bagi dimulainya perubahan-perubahan identitas-identitas dan simbol-simbol secara dramatis. Politik global mulai melakukan rekonfigurasi di sepanjang lintas batas kultural. Naik turunnya bendera-bendera menjadi pertanda bahwa sedang terjadi masa-masa transisi. Namun, semakin sering naik turunnya bendera, semakin banyak pula bendera-bendera yang menjulang tinggi dan berkibar dengan pasti. Pada 18 April 1994, di Sarajevo, dua ribu orang turun ke jalan sambil melambaikan-lambaikan bendera Turki dan Arab Saudi. Dengan mengibarkan panji-panji ini, sebagai ganti bendera-bendera PBB, NATO, dan Amerika Serikat, orang-orang Sarjevo ini menyatakan diri bahwa mereka adalah Muslim dan mengabarkan pada dunia tentang siapa kawan dan musuh mereka.⁵⁴

Gerakan nasionalis Eropa lainnya yang memiliki konsekuensi terhadap sejarah dunia dan relevansi langsung bagi dunia Islam adalah Zionisme. Gabungan gairah dan ide-ide ini tidak berbeda dengan semua nasionalisme Eropa abad ke-19 yang lain dalam argument dan seruannya. Gerakan ini setuju dengan Herder bahwa orang-orang yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama adalah sebuah bangsa. Gerakan ini setuju dengan Mazzini bahwa sebuah bangsa memiliki hak atas negara yang dijalankan dengan pemerintahan

⁵³Musyirifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007) h. 181&182

⁵⁴Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (Amerika Serikat: Simon & Schuster, 1996) tjr. Sadat Ismail, *Benturan AntarPeradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (Cet XII, Jakarta: Qalam, 2012) h. 4

sendiri yang terletak dengan aman di dalam wilayahnya sendiri.gerakan ini setuju dengan orang-orang seperti Treitschke bahwa sebuah negara-bangsa memiliki hak (bahkan takdir) untuk menyertakan semua rakyatnya sendiri di dalam batas-batas dan hak untuk mengecualikan semua orang lain jika perlu. Jika orang-orang Jerman adalah sebuah bangsa dan memiliki hak tersebut, kata pendiri Zionisme politis, jika orang-orang Italia adalah sebuah bangsa, jika orang-orang Prancis adalah sebuah bangsa, maka demi Allah orang-orang Yahudi pun adalah sebuah bangsa.

Namun ada satu perbedaan penting antara Zionisme dan nasionalisme Eropa abad ke-19 lainnya. Italia, Jerman, Serbia, dan yang mengklaim hak nasionalisme hak atas wilayah yang mereka tinggali. Orang-orang Yahudi tidak memiliki wilayah. Mereka tersebar di seluruh dunia selama dua ribu tahun dan kini hidup sebagai buruh minoritas di negara orang lain. Akan tetapi, selama dua ribu tahun mereka berada di Diaspora, orang Yahudi telah bersatu, mempertahankan rasa kebangsaan yang dibangun di sekitar Yudaisme yang bersifat budaya dan sejarah sekaligus religius: di Eropa abad ke-19, sangat mungkin menjadi Yahudi tanpa menjalankan ibadah atau bahkan “memercayai” Yahudi. Namun, unsur inti narasi religiohistoris Yahudi menyatakan bahwa Allah telah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Ibrani yang asli, Ibrahim dan suku keturunannya sebagai balasan karena mereka tidak menyembah yang lain hanya mematuhi perintah-perintah-Nya. Menurut narasi ini, orang Yahudi telah memenuhi apa yang mereka janjikan dalam tawar-menawar itu dan karenanya berhak untuk merebut kembali tanah mereka, wilayah yang disebut Palestina, yang sekarang dihuni orang-orang Arab dan dikuasai Turki Utsmani.

Banyak Zionis Eropa abad ke-19 yang sekuler tetapi ajaran tentang tanah yang dijanjikan ini tetap saja masuk ke dalam argumen untuk sebuah negara-negara bangsa Yahudi di sepanjang pantai timur Laut Tengah.⁵⁵

Pengkhianatan kristiani Inggris terhadap Islam dan umat Islam dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Janji Balfor

Tidak ada bukti yang jelas atas pengkhianatan Inggris daripada janji yang diberikan oleh Balfor, seorang Kristen yang sangat membenci kaum Arab, Islam, dan umat Islam. Dia berjanji kepada kaum Yahudi untuk mendirikan sebuah negara bagi mereka di Palestina. Orang ini seakan-akan telah mewarisi tanah Palestina dari nenek moyangnya yang dapat dia berikan kepada siapa saja. Balfor ini merupakan sebuah langkah awal dari terenggutnya Palestina dari tanah bangsa Arab dan umat Islam, serta menjadikannya santapan yang lezat dan mangsa yang mudah diincar lawan, yaitu bangsa Yahudi.

2. Sikap Inggris yang mempertahankan keberadaan Zionisme di Palestina

Negara Inggris beserta beberapa negara lainnya seperti Prancis dan Italia merupakan musuh bebuyutan bangsa Arab dan umat Islam semenjak era Perang Salib. Inggris terus melakukan penguatan sendi kemiliteran bagi bangsa Yahudi dengan jalan memperkuat persenjataan kaum Yahudi serta melucuti senjata bangsa Arab dan membubarkan organisasi-organisasi semi militer mereka serta memburu mereka sampai ke semua penjuru negeri untuk membasmi dan meneror mereka di negara mereka sendiri.

⁵⁵Tamim Ansary, *Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes* (United States: Public Affairs, 2009) trjm. Yuliani Liputo, *Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam* (Jakarta: Zaman, 2012) h. 453&454

3. Strategi penumpasan Inggris terhadap bangsa Palestina

Kebijakan sipil Inggris berupa penumpasan kelompok-kelompok sipil Palestina. Kebijakan ini, tidaklah lebih lunak dari kebijakan militer mereka. Pemerintah kolonial Inggris membubarkan Dewan Tinggi Arab dan dalam waktu yang bersamaan mendukung penuh keberadaan Konsulat Yahudi. Mereka juga membubarkan partai-partai politik Arab Palestina dan memenjarakan para anggotanya serta mengasingkan mereka ke beberapa kepulauan yang terletak di Samudera Hindia. Semua itu menguntungkan pihak Yahudi di Palestina.

4. Strategi kotor Yahudi yang diadopsi oleh negara Inggris dengan menarik diri dari Palestina serta mengumumkan akhir protektorat Inggris terhadap Palestina

Cara ini sangat berpengaruh dalam jalannya beberapa kejadian setelahnya di Palestina. Tidak lama berselang, Inggris menyerahkan kendali pemerintahan kepada Konsulat Yahudi dan memberikan ruang gerak yang bebas kepada kekuatan militer Yahudi untuk dapat menduduki semua tanah Palestina sebagaimana telah digariskan dalam skenario busuk yang bertujuan untuk menguasai Palestina dengan paksa sebelum diketahui oleh pasukan Arab serta memberikan cukup waktu bagi Israel untuk memproklamirkan berdirinya negara mereka.⁵⁶

Bulldoser aparat keamanan Israel menghancurkan sebuah rumah milik warga Palestina. Tindakan tersebut dilakukan di Kota Lod. Lod merupakan sebuah wilayah pendudukan Israel yang berada di Distrik Pusat. Wilayah tersebut ditinggali warga

⁵⁶Muhyiddin Mas Rida, *Pengkhianat-Pengkhianat Dalam Sejarah Islam*, h. 309

Yahudi dan Arab. Rumah yang dihancurkan diketahui milik keluarga asal Palestina, Al-Faqir. Israel beralih penghancuran mesti dilakukan karena bangunan tersebut melanggar izin konstruksi. Dari keterangan seorang saksi mata, aparat keamanan Israel memblokir seluruh akses menuju rumah tersebut. Seluruh anggota keluarga Al-Faqir juga dilarang untuk masuk ke rumahnya. Saat penghancuran dilakukan, aparat keamanan Israel melakukan penjagaan sangat ketat. Salah seorang anggota keluarga Sanad Al-Faqir mengatakan, tindakan Israel tak masuk akal. Rencana penggusuran, telah diketahui keluarga Al-Faqir sejak Maret lalu. Pejabat Israel menyebut, selain tidak berizin, rumah itu dihancurkan untuk membuat jalan. Israel diketahui tidak pernah memberikan izin pendirian rumah bagi etnis Arab-Palestina tanpa alasan jelas.⁵⁷

Israel menggunakan “air sigung (*skunk water*)” di Tepi Barat termasuk di Yerusalem Timur yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak warga Palestina termasuk hak atas kesehatan dan pekerjaan, dan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Cairan berbau busuk ini dibuat dari air, ragi, dan natrium bikarbonat yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, mual dan sakit perut. Air sigung yang dialirkan di selokan-selokan juga menimbulkan bau menyengat. Air sigung dirancang untuk membubarkan kerumunan warga Palestina dengan menyemprotkan dari kejauhan. Selain itu, semprotan air sigung juga diarahkan langsung ke rumah-rumah warga dan pertokoan. Selama rentang waktu antara Juli hingga Desember 2014, *Association for Civil Right* di Israel melaporkan bahwa di setiap jalan-jalan di lingkungan Yerusalem Timur telah

⁵⁷Liputan 6, *Israel Hancurkan Sebuah Rumah Warga Palestina*, Dikutip dalam situs: <http://global.liputan6.com/read/3077783/israel-hancurkan-sebuah-rumah-milik-warga-palestina-buat-apa> (Diakses pada 31 Agustus 2017)

disirami jumlah cairan sigung yang sangat banyak. Sebagian besar cairan itu ditujukan terhadap perumahan, mobil, dan toko-toko.

Pembatasan pergerakan yang dikenakan oleh Israel telah membatasi akses atas pemenuhan hak kesehatan warga Palestina di pusat-pusat kesehatan atau rumah sakit yang terletak di Yerussalem Timur. Di Area C, keleluasaan berpergian warga Palestina dibatasi oleh pos-pos pemeriksaan, gerbang jalan dan penghalang jalan. Warga Palestina yang tinggal di Area C sangat sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Hal ini juga berdampak terhadap masyarakat Badui pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas kesehatan setempat. Akses juga sangat sulit didapat di kota tua Hebron, di mana warga Palestina tinggal di dekat populasi mayoritas pemukim ilegal Israel. Sebuah survey yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2011 mencatat bahwa dari 102 keluarga di kota tua Hebron 63 persen dari mereka harus menyebrangi pos pemeriksaan Israel untuk mengakses layanan kesehatan. Salah seorang warga menceritakan pengalamannya di mana ambulans Palestina dicegah untuk masuk di daerahnya meskipun saat itu kondisi darurat. Alhasil, akses mendapatkan jasa ambulans tertunda sangat lama karena dibutuhkan koordinasi dengan aparat Israel terkait kebijakan mereka atas akses.

Dampak buruk lainnya dari kebijakan okupansi dan pelanggaran hak atas kesehatan ialah banyaknya korban cedera bahkan mati dari warga Palestina terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemukin ilegal dan pasukan keamanan Israel terhadap mereka. Selain itu, limbah para pemukim ilegal dan pabrik-pabrik Israel yang tidak diolah dengan baik juga berdampak buruk

kepada kondisi kesehatan warga Palestina. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup Palestina menyatakan keprihatinan serius tentang limbah berbahaya tersebut, termasuk bahan kimia dan puing-puing elektronik yang dihasilkan oleh Israel dan pemukiman ilegal mereka yang “dibuang” di Tepi Barat.

Aksi okupansi dan tindakan sewenang-wenang Israel telah menyebabkan terjadinya gangguan mental dan kemanusiaan warga Palestina. Para warga yang hidup di tengah-tengah ketegangan dan tindak kekerasan akibat aksi permukiman ilegal, ancaman dan eksekusi penghancuran rumah-rumah mereka, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan Israel, pembuatan dinding pembatas, pembatasan pergerakan warga dan penutupan akses terhadap fasilitas pendidikan, pekerjaan, tanah dan air, berlakunya system peradilan militer Israel atas anak-anak dan warga Palestina yang minim akuntabilitas, telah menyebabkan gangguan mental yang serius bagi warga Palestina.⁵⁸

Aksi perlawanan pihak Palestina adalah suatu perbuatan untuk mewujudkan sikap dan keinginan mereka dalam membela dan mempertahankan diri karena terus-menerus diperlukan secara semena-mena dan tidak manusiawi oleh Israel. Mereka tidak mempunyai persenjataan, jip-jip serta kendaraan militer dan tank-tank untuk patrol, apalagi jet-jet tempur dan helikopter apache serta bludoser seperti yang dimiliki oleh Israel yang dipergunakan untuk menghancurkan harta benda dan jiwa raga rakyat Palestina. Warga Palestina hanya mempunyai batu dan ketapel, selain jumlah kecil senjata yang dituduh sebagai hasil selundupan dan perbuatan itu dianggap melawan hukum. Di atas semua itu, aksi bom bunuh diri para aktivis Palestina merupakan langkah untuk

⁵⁸Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 78-80

menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa mereka masih ingin tetap eksis, tidak ingin dan tidak rela diperlakukan secara semena-mena, tidak adil, dan tidak manusiawi. Hanya itulah mungkin langkah yang paling efektif yang dapat mereka lakukan untuk melawan segala bentuk aksi kekerasan dan kekejaman Israel terhadap mereka yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya.⁵⁹

Hakikat konflik Arab-Israel telah dipahami secara keliru selama bertahun-tahun sebab Israel berhasil melukiskannya sebagai perselisihan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Dalam kenyataannya, inti konflik itu jauh lebih terbatas dan lebih bersifat pribadi. Inti konflik itu terletak pada upaya Zionis untuk merebut tanah dan rumah-rumah bangsa Palestina; suatu kampanye tak kenal belas kasihan yang terus berlanjut hingga hari ini. Dimensi Arab yang lebih luas merupakan akibat sampingan. Usaha-usaha perdamaian tampaknya akan tetap tidak efektif kecuali jika hakikat konflik itu dipahami dan diakui di Amerika Serikat.⁶⁰



⁵⁹N. Hassan Wirayuda, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, h. 104

⁶⁰Paul Findley, *Deliberate Deceptions: Facing The Facts About The U.S-Israeli Relationship* (New York: Lawrence Hill Books, 1993) trjm. Rahmani Astuti, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel* (Bandung: Mizan, 1995) h. 240

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA
DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMASI

A. Pandangan hukum Islam mengenai konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomasi

Pada zaman Yunani kuno, kota merupakan kesatuan negara. Setiap negara kota (*city state*), seperti Sparta, Athena, dan Apolonia, merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri. Hubungan antara negara kota di Yunani terikat oleh perasaan satu warga, satu bahasa, dan satu agama. Adapun hubungan antara negara kota-negara kota Yunani dengan negara kota-negara kota di luar kawasan Yunani di dasarkan kepada prinsip “Bangsa Yunani harus menguasai bangsa-bangsa lain di luar kawasan Yunani, karena bangsa Yunani merupakan bangsa yang unggul.”

Hal ini berbeda dengan gejala hubungan internasional yang terjadi selama zaman Romawi. Pada waktu itu hubungan baik antarnegara kota didasarkan pada hukum ketatanegaraan dan penghormatan kepada setiap negara lain. Akan tetapi, negara Romawi memegang kekuasaan untuk memutuskan setiap persengketaan yang timbul. Warga negara Romawi yang asli menganggap bahwa bangsa Romawi adalah bangsa unggul. Kemudian, penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorikan ini mengakibatkan pemunculan dan perkembangan imperium Romawi. Dalam bidang hukum, muncul apa yang disebut *ius civile* sebagai

hukum yang harus berlaku bagi orang Romawi, dan *ius gentium* sebagai hukum antarbangsa.⁶¹

Catatan pertama tentang tindakan diplomatik dalam Muhammad SAW, dijumpai jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Tepatnya saat Muhammad SAW masih berusia tiga puluh lima tahun, yaitu ketika di Mekkah muncul sebuah perdebatan tatkala rekonstruksi Ka'bah, satu tempat ibadah paling penting yang diwarisi Quraisy dari Nabi Ibrahim, hampir selesai dikerjakan. Seluruh suku yang ada di Jazirah Arab itu bahu-membahu membangun kembali bangunan tersebut. Bahan-bahan bangunan dipilih dari bahan-bahan terpilih. Bahan-bahan kayunya dibeli dari pelabuhan Jeddah, dan seorang Romawi bertindak sebagai penasihat konstruksi. Para pekerja dengan tekun membangun bangunan itu hingga semuanya selesai. Kini yang tersisa hanya peletakan kembali Hajar Aswad. Siapa yang berhak meletakkannya. Semua suku dan kabilah yang bekerja dengan keras sama-sama menyatakan berhak untuk meletakkan batu terhormat tersebut. Mereka pada awalnya sepakat bergotong royong berkeja untuk membangun bangunan tersebut kini terpecah dan membentuk aliansi masing-masing. Mereka seperti siap untuk bertempur. Salah seorang dari mereka Bin Abdul Dar membawa satu mangkok besar berisi darah, yang lain Bin Ady bin Ka'ab Lu'ayy menjilat darah sebagai sumpah setia untuk mati. Mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam darah. Yang merupakan simbol bahwa mereka siap mengorbankan milik mereka yang paling berharga dan siap mati sampai darah yang penghabisan. Situasinya begitu kritis.⁶²

⁶¹Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2003) h. 120

⁶²Afzal Iqbal, *Diplomacy In Early Islam* (Lahore: Qaumi Press, 2000) trjm. Samson Rahman, *Diplomasi Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000) h. 3

Dengan lahirnya Islam, dengan melihat lahirnya satu perubahan secara revolusioner yang menancapkan prinsip hukum internasional dan diplomasi. Islam dengan tegas menyatakan persamaan antarmanusia. Allah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶³

Perbedaan yang ada antara orang-orang Yunani dan Badar, Yahudi dan Amalika, Romawi dan Kristen Timur yang dianggap inferior dihapuskan. Prasangka berdasarkan warna kulit, ras dan bahasa di kutuk. Semua negara dan manusia, tanpa memandang agama dan rasnya, dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah SWT berfirman pada ayat Al-Baqarah ayat 62 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّبِيَّانَ مَنِ ءَامَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁶⁴

⁶³Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka, 1971) h. 847

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 19

Islamlah yang pertama kali menghadirkan ide negara universal atas dasar persamaan di antara manusia. Dalam hukum Islamlah, didapatkan pertama kali, hak-hak musuh, baik dalam keadaan perang maupun damai yang dijamin dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Hukum Internasional Islam menawarkan regulasi aturan negara Muslim dengan formula yang seadil-adilnya. Bukan saja antara negara Muslim, namun juga dengan negara non-Islam di seluruh dunia.

Dalam konsep diplomasi yang dikenal di negara-negara Barat, peran agama sangat tidak disinggung sama sekali, bahkan tidak dikenal sama sekali oleh otoritas dalam hukum internasional dan diplomasi. Kata-kata “diplomasi” di negara-negara Barat memiliki beberapa perbedaan arti, yang artinya, seperti yang dikatakan oleh Afzal Iqbal, “seringkali tidak cocok dengan kebaikan dan kejujuran seperti dalam standar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad”. Studi diplomasi Barat kemudian memperoleh pengaruh signifikan dari peradaban Yahudi dan Kristen, sehingga semua pembahasan tentang Islam telah dihapuskan dan dianggap sebagai Abad kegelapan. Islam menyediakan ide negeri universal yang berdasarkan pada kesamaan manusia. Dalam hukum Islam, hak-hak musuh banyak dibahas, baik dalam kondisi damai ataupun perang, hak-hak tersebut seperti yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad dan Kitab Al-Qur'an. Hukum internasional dalam Islam mencoba mengatur pelaksanaan sebuah negara Islam dan menerapkan dasar yang paling adil, tidak saja menyangkut hubungan dengan sesama negara Islam, akan tetapi dengan negara-negara non-Islam. Sumber-sumber hukum Islam dalam negara terdapat dalam kategori-kategori seperti yang didefinisikan oleh hakim-hakim modern. Hukum Islam yang terkait dengan masalah kesepakatan, bea-cukai, dasar politik, dan otoritas

pemerintahan. Al-Qur'an memberikan ajaran-ajaran untuk diterapkan dalam pemerintahan, melalui Sunnah (penerapan dan contoh-contoh kehidupan Nabi) seperti yang diwakili oleh bea, peraturan-peraturan yang telah diterapkan di dalam Traktat dimasukkan ke dalam kategori kesepakatan, serta opini dari para sahabat (Khalifah) dan keputusan-keputusan pengadilan termasuk dalam alasan.

Sanksi moral dan inspirasi bagi orang Islam adalah ajaran-ajaran Al-Qur'an dan contoh-contoh dalam kehidupan Nabi Muhammad. Seorang diplomat Muslim harus mengkaitkan orientasi agama dengan profesinya. Terdapat beberapa peraturan yang membahas tindakan Nabi baik sebagai seorang negosiator maupun sebagai seorang yang "dikarunia tanggung jawab untuk menjamin bahwa kesepakatan dalam segala bentuknya, masuk melalui ciptaan Tuhan yang harus dihargai dengan segala ketulusan hati tanpa memandang latar belakang kejadian tersebut. Tujuan utama diplomasi adalah untuk mencari penyelesaian damai dari masalah-masalah internasional dan menciptakan harmoni antara negara-negara yang beragam. Nabi Muhammad, yang juga seorang kepala negara, telah mencapai tujuan ini dengan metode diplomasi yang telah dipelajari dengan baik, melalui negosiasi, mediasi, dan abditrasi. Diplomasi ala Nabi Muhammad lebih lanjut mengatakan bahwa seorang Muslim membuat komitmen dengan seorang individu atau dengan negara lain, tindakannya diasumsikan sebagai membuat kesepakatan Tuhan. Dalam Islam, komitmen dari seorang individu telah menjadi kewajiban dari seluruh umat. Maka dari itu, jika ia gagal untuk menghargai kata-katanya, dia akan bersalah karena telah mengingkari kebenaran.⁶⁵

⁶⁵Sukawarsini Djeantik, *Diplomasi Antar Teori Dan Praktik*, h. 9&10

Hal tersebut membuktikan bahwa Islam telah memberikan pengaruh yang besar atas perkembangan mengenai diplomasi, huku dan perjanjian internasional pada era kontemporer ini, termasuk salah satunya meletakkan dasar bagi cara-cara dan prinsip-prinsip dalam berdiplomasi.

B. *Sistem penyelesaian konflik Israel-Palestina*

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar-negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi sumber terpenting dalam hubungan damai antara Negara masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk perang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.⁶⁶

Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi pemerintah antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia. Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor

⁶⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003) h. 119

dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan. Hubungan internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti hubungan internasional, politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama (*sinonim*).⁶⁷

Suatu bagian penting hubungan antara pendapat dan politik luar negeri akan terabaikan jika mengemukakan bahwa para pembuat kebijakan hanya menanggapi tekanan publik. Sebenarnya hubungan di dalam masyarakat demokratis melibatkan interaksi yang kompleks. Dalam interaksi inilah para pejabat dan publik atau kelompok-kelompok komponennya saling beraksi terhadap perilaku, nilai-nilai, dan kepentingan satu sama lain. Jika dalam beberapa kasus para pejabat pemerintah merasa terhalang memilih sasaran dan tindakan kebijakan yang sesuai dengan suasana jiwa publik yang ada, tidaklah sama sekali salah jika mereka menghabiskan waktu untuk mendukung posisi mereka dan karakteristik situasi kepada penduduk. Karena pengetahuan yang unggul dan jalan untuk memperoleh informasi, pemerintah menduduki suatu posisi strategis untuk menafsirkan realitas penduduk dan secara aktual untuk menciptakan sikap, pendapat, dan kesan yang sebelumnya belum ada. Meskipun media komunikasi independen dapat mengungkapkan pandangan yang berbeda, seorang perdana menteri atau presiden dapat sangat meyakinkan karena prestise

⁶⁷Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) h. 4

dan keahlian politisinya. Telah sering diamati bahwa informasi atau propaganda yang berasal dari suatu sumber yang dapat dipercaya dan berprestise mempunyai dampak yang lebih besar atas pendapat yang mendapat informasi dari sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya.⁶⁸

Penyelesaian suatu sengketa internasional erat kaitannya dengan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sebuah sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, Masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang.

⁶⁸K.J. Holsti, *International Politics A Framework for Analysis* (Prentice: Hall, 1983) tjr. M. Tahir Azhary, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis* (Jakarta:Erlangga, 1983) h. 117

Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa secara kekerasan.

Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional dan charter perserikatan bangsa-bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok charter tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan perserikatan bangsa-bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara negara-negara.

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional publik digolongkan dalam dua kategori:

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan karena jalur damai tidak berhasil.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 33 tentang penyelesaian pertikaian secara damai dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan:

⁶⁹Dedek Buana, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dan Kekerasan*, Dikutip dalam situs <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/> (Diakses pada tanggal 6 November 2017)

1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan kewanteran internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu.⁷⁰

Dalam sebuah penyelesaian sengketa internasional yang terjadi, ada beberapa cara untuk menyelesaikan, yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak yang bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomasi pada konferensi internasional atau alam suatu lembaga atau organisasi internasional. Negosiasi juga biasanya digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, baik berupa sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada

⁷⁰Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 33

suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.

2. Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak an kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian, karenanya bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

3. Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.

4. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bias negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai pada berakhirnya tugas mediator.

5. Konsiliasi

Cara penyelesaian sengketa ini sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bias yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

6. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

7. Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice/ICJ*).

Kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ekonomi internasional.⁷¹

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi:

1. Perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukkan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan

⁷¹Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, h. 19-24

sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.

Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan '*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered*', Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.

2. Restorsi (*Restortion*)

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif.

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak

mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut.

3. Tindakan-Tindakan Pembalasan (*Reprisals*)

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Pembalasan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan reprisal dan retorsi adalah bahwa pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan.

4. Blokade Secara Damai (*Pacific Blockade*)

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukkan untuk memaksa negara yang

pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia.

5. Intervensi (*Intervention*)

Internvensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Tindakan tersebut adalah apabila:

- a. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB;
- b. Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain;

- c. Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan tersebut.⁷²

Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan. Tindakan tersebut masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB untuk dapat terwujud. Keempat tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Preventive Diplomacy*

Preventive diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa diantara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional bekerja sama PBB.

2. *Peace Making*

Peace making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga

⁷²Dedek Buana, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dan Kekerasan*, Dikutip dalam situs <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/> (Diakses pada tanggal 6 November 2017)

perdamaian. Di antara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai. Dalam perannya di sini, Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketa.

3. *Peace Keeping*

Peace keeping adalah tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personil militer, polisi PBB, dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata (angkatan perang).

4. *Peace Building*

Peace building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace building* lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka. Hal ini demikian tidak saja member kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.⁷³

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel melibatkan negara-negara Arab disebabkan oleh pendudukan wilayah Palestina dan negara-negara Arab oleh Israel. Mengkaji sejarah Israel, tidak terlepas dari sejarah Yahudi, berawal

⁷³Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, h. 95-97

sejak zaman Nabi Ibrahim yang mempunyai dua orang putra, yaitu Ismail dan Ishaq, kemudian dari keturunan Ishaq lahir Bani Israel. Ibrahim mampu melepaskan diri dari kekafiran dan menyembah berhala menuju penyembahan kepada Allah yang transenden. Ibrahim tampil dengan revolusi pemikiran dengan melakukan protes terhadap tradisi masyarakat yang telah mapan. Kemudian, membawanya pindah bersama keluarganya meninggalkan tanah airnya menuju Kanaan, sebuah tempat bersejarah bagi Bani Israel dan keturunannya yang kemudian hari dikenal dengan umat Yahudi.

Gerakan Zionisme dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi sebuah gerakan politik, bukan terbatas pada keagamaan. Zionisme politik hadir dengan menampilkan ide pembaruan dalam segala bidang yang bermuara pada ide kebangsaan. Mereka mengklaim Palestina sebagai wilayah leluhur mereka “tanah yang dijanjikan” Tuhan terhadap umat Yahudi. Negara Israel adalah sebuah negara yang diproklamasikan bukan melalui sebuah perjuangan antikolonial, tetapi oleh para pendatang, melalui pengusiran, pembersihan etnis bangsa Palestina dan pelanggaran hukum internasional.

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di Timur Tengah yang berusaha mencari penyelesaian konflik, terus berlangsung. Namun, proses itu selalu mengalami jalan buntu oleh sikap arogansi Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menjajah dan menguasai Palestina. Peperangan yang terjadi melibatkan negara-negara tetangga dan menelan banyak korban jiwa sulit diprediksi kapan akan berakhir. Penyelesaian konflik melalui diplomasi pun terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, baik oleh PBB, OKI,

maupun negara-negara yang berada di kawasan tersebut, seperti Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara lainnya. Namun, tidak selalu memperoleh hasil yang dapat mengakomodasi kepentingan Israel-Palestina secara adil. Hal ini karena oleh banyaknya kendala yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut, antara lain ialah kuatnya lobi pro Israel di negara-negara Barat yang mempunyai kekuatan hak veto dalam PBB. Kuatnya dominasi AS dan negara-negara Barat dalam bidang militer, ekonomi, politik, dan teknologi dijadikan alat kendali untuk menguasai dunia internasional.

Adanya konflik internal dan lemahnya persatuan negara-negara Arab menambah kendala dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Juga tidak ada kesepakatan di antara negara-negara Arab dan Palestina dalam menekan dan melakukan diplomasi terhadap AS dan negara-negara Arab. Selain itu, pengaruh dan tindakan berbagai gerakan kemerdekaan Palestina seperti, HAMAS dan organisasi lainnya yang sering tidak sepakat dengan kebijakan penguasa resmi Palestina PLO, memperpanjang rangkaian masalah yang dihadapi Palestina. Hambatan internal yang dihadapi negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan negara Arab lainnya untuk berperan optimal menyelesaikan masalah Palestina timbul karena lemahnya pengaruh negara-negara Arab akibat ketergantungannya dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan teknologi terhadap AS sehingga tidak mempunyai posisi tawar-menawar yang dapat meyakinkan AS agar mau menerima desakan negara-negara Arab untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan memaksa Israel untuk mengikuti beberapa keputusan PBB dan perjanjian yang sudah disepakati.

Dari realitas ini, tampak konfigurasi dan kondisi politik di Israel dan Palestina dengan minoritasnya kekuatan-kekuatan yang pro perdamaian, masih partisannya sikap Amerika Serikat dalam berpihak pada Israel merupakan indikasi masi suram-suramnya prospek perdamaian Israel dan Palestina. Perdamaian di Timur Tengah masih merupakan “harapan yang jauh dari kenyataan”. Apalagi, bentrokan antara warga Palestina dengan pemukin Yahudi Israel masih terus berlangsung.

Dalam melakukan perundingan tersebut Mantan Menteri Luar Negeri James Baker suka mengatakan bahwa perdamaian dapat muncul di Timur Tengah hanya jika semua pihak dalam konflik itu menghendaknya. Namun catatan Israel dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah secara konsisten lebih memilih tanah daripada perdamaian. Sebagaimana, ditulis oleh Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dalam buku hariannya pada 1949: “Perdamaian memang penting, tetapi tidak ditukar dengan harga berapa pun.” Itulah prinsip yang akan menuntun setiap pemimpin Israel selanjutnya.⁷⁴

Kunci utama penyelesaian masalah Palestina yang sudah terlanjur dipersepsi sebagai masalah konflik Islam *versus* Yahudi ini adalah sikap dunia Barat yang dewasa ini didominasi oleh agama Kristen Protestan dan Katolik. Jika mereka dapat menjadi penengah yang tepat dan efektif, tentu masalah Palestina akan dapat diselesaikan dengan baik. Bersamaan dengan itu, dunia Islam sendiri jangan pula mau terprovokasi oleh keadaan dengan bertindak brutal, menyebar kebencian dan permusuhan terus-menerus. Penyelesaian status

⁷⁴Paul Findley, *Deliberate Deceptions: Facing The Facts About The U.S-Israeli Relationship* (New York: Lawrence Hill Books, 1993) trjm. Rahmani Astuti, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel* (Bandung: Mizan, 1995) h. 283

Palestina merdeka ini tentu membutuhkan peran aktif negara muslim. Tapi mengharapkan peran itu datang dari kalangan negara-negara Arab di Timur Tengah sepertinya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena itu, pemimpin negeri muslim dari dunia Melayu mendapatkan peluang terbuka untuk tampil. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan di kenal memiliki budaya keberagaman yang sangat inklusif dengan kemampuan untuk hidup rukun dan damai di tengah keanekaragaman budaya dan agama penduduk Nusantara di sepanjang sejarah. Rasanya, ada peluang bagi Indonesia untuk bersama-sama dengan negara-negara besar lainnya tampil menawarkan solusi bagi masa depan Israel dan Palestina yang semakin maju, sejahtera, adil, merdeka, dan bersatu sebagai sesama keturunan Nabi Ibrahim a.s. semangat persaudaraan di antara bangsa Israel dan bangsa Palestina akan mengembalikan semangat persaudaraan di antara sebagian terbesar penduduk dunia yang sama-sama percaya kepada Nabi Ibrahim, baik mereka yang percaya Yesus Kristus dengan menganut agama Katolik dan Kristen Protestan dengan segala sekte, dan alirannya; dengan mereka yang beragama Islam yang percaya kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dengan segala mazhab dan alirannya, maupun dengan mereka yang percaya dengan Nabi Musa dan kitab Taurat dengan menganut agama Yahudi, juga dengan segala alirannya. Ketiga agama Yahudi, Kristen (Katolik dan Protestan), dan Islam tidak lain adalah agama yang berakar dari sejarah yang sama, yaitu ajaran Nabi Ibrahim (*millata Ibrahim*), sehingga biasa dikenal dengan "*the Abrahamic religions*", yang sudah seharusnya dapat diturunkan kembali untuk kepentingan seluruh umat manusia.⁷⁵

⁷⁵Makarim Wibisono, *Diplomasi Untuk Palestina*, h. 6

Jika perdamaian antara Israel dan Palestina gagal diwujudkan, peranan dan popularitas kelompok-kelompok Islam garis atas akan meningkat, seperti Hamas dan gerakan lainnya karena semula kelompok-kelompok itu berkeyakinan Israel hanya dapat dikalahkan dengan jihad. Maka, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah perang (jihad). Keyakinan tersebut akan semakin menguat sejalan dengan meningkatnya odoksi di tubuh Israel.⁷⁶



⁷⁶Hermawati. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, h. 197-198

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posisi pemerintahan kedua belah pihak juga turut menjadikan konflik ini berkepanjangan sekaligus membuat usaha PBB sia-sia lantaran kurang dipercaya oleh keduanya. Israel dan Palestina sama-sama tidak sepenuhnya mempercayai PBB dan meyakini peranannya sebagai mediator netral yang berperan sebagai jalan tengah yang sepenuhnya netral dalam usahanya membantu mencari penyelesaian bagi konflik ini.
2. Hak rakyat Palestina untuk mendirikan Negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel) dan hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya. Adanya pengkhianatan orang-orang Arab terhadap negaranya sendiri yaitu menjual tanah mereka kepada kaum Yahudi serta penggunaan tenaga kerja dari bangsa Arab Palestina di lahan pertanian dan industri Yahudi. Pengadaan blokade yang dilakukan Israel selama lebih tujuh tahun telah memaksa warga Palestina yang tinggal di Gaza hidup dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Israel telah melanggar batas teritorial dan melanggar hukum internasional.
3. Dalam konsep diplomasi Islamlah yang pertama kali menghadirkan ide negara universal atas dasar persamaan di antara manusia. Dalam hukum Islamlah, didapatkan pertama kali, hak-hak musuh, baik dalam keadaan perang maupun damai yang dijamin dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Hukum Internasional Islam menawarkan regulasi aturan

negara Muslim dengan formula yang seadil-adilnya. Bukan saja antara negara Muslim, namun juga dengan negara non-Islam di seluruh dunia.

B. Implikasi

1. Seluruh pemerintah di berbagai negara diharapkan berperan aktif dalam memberi dukungan dan mengupayakan diplomasi yang optimal dalam perundingan damai.
2. Bersatunya negara-negara Arab menjadi faktor penentu bagi terwujudnya negara Palestina merdeka dalam arti nyata.
3. Resolusi PBB seharusnya diiringi dengan diberlakukannya sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan resolusi tersebut. Selama ini resolusi yang dikeluarkan PBB hanyalah dianggap angin lalu oleh Israel, lantaran tidak ada sanksi yang diberlakukan. PBB seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat Israel dan Palestina mempertanyakan kereabilitasnya. Hanya Israel dan Palestina sajalah yang dapat menuntaskan konflik ini sepenuhnya, dan bila PBB ingin membantu, sebisa mungkin inisiatif yang dilakukan harus benar-benar tidak bisa dan tidak membawa kepentingan di luar kedua negara yang berseteru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu. *Hamas dan PLO (Palestine Libration Organization)*. Dikutip dalam situs: <http://vandocrmakaruku.blogspot.co.id/2009/08/hamas-dan-plo.html> (Diakses Agustus 2017).
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Agha, Mahir. *Yahudi Catatan Hitam Sejarah*. Cet. XII; Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Amstrong, Keren. *Holy War The Crusades and Their Impact on Today's World*. New York: Anchor Books, 2001. trjm. Hikmat Darmawan. *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ansary, Tamim. *Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes*. United States: Public Affairs, 2009. trjm. Yuliani Liputo. *Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Buana, Dedek. *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dan Kekerasa*. Dikutip dalam situs <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/> (Diakses pada tanggal 6 November 2017)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2003.
- Djeantik, Sukawarsini. *Diplomasi Antar Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Donok, Rian. *Konflik Palestina dengan Israel dan Pengaruhnya Terhadap Dunia*. Dikutip dalam situs <https://riandonok.blogspot.co.id/2015/04/konflik-palestina-dengan-israel-dan.html> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).
- Dosen Universitas Kristen Indonesia, *Kenallah Perserikatan Bangsa-Bangsa* (Cet IV, Jakarta: Erlangga, 1987).
- Efendi, Masyur. *Hukum Diplomati Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomati Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Fajar, *Konflik Palestina dan Israel: Agama, Tanah Air dan Politik*. <https://ekomarhaendy.files.wordpress.com/2011/02/analisis-sosial-konflik-israel-palestina.pdf> (Diakses pada 20 November 2011).
- Findley, Paul. *Deliberate Deceptions: Facing The Facts About The U.S-Israeli Relationship* (New York: Lawrence Hill Books, 1993) tjmh. Rahmani Astuti, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*. Bandung: Mizan, 1995.

- Handono, Irena. *Menyingkap Fitnah dan Teror*. Bekasi: Gerbang Publishing, 2008.
- Hassan Wirayuda, N. *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004.
- Hermawan, Yulius P. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hermawati. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Cet. III; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Iqbal, Afzal. *Diplomacy In Early Islam*. Lahore: Qaumi Press, 2000 trjm. Samson Rahman, *Diplomasi Islam* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka, 1971.
- Liputan 6, *Palestina Hentikan Hubungan Diplomatik dengan Isreal*, Dikutip dalam situs <http://news.liputan6.com/read/3032202/palestina-hentikan-hubungan-diplomatik-dengan-israel> (Diakses pada 23 Juli 2017).
- Israel Hancurkan Sebuah Rumah Warga Palestina*. Dikutip dalam situs: <http://global.liputan6.com/read/3077783/israel-hancurkan-sebuah-rumah-milik-warga-palestina-buat-apa> (Diakses pada 31 Agustus 2017).
- Malik, Muhammad. *Tujuan Diplomasi*, Dikutip dalam situs: simplenews05.blogspot.co.id/2015/05/tujuan-diplomasi.html?m=1 (Di akses 9 Mei 2017).
- Mardani. *Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nurdi, Sobirin. *Diplomasi*. Dikutip dalam situs: <http://studi-hi.blogspot.co.id/2010/05/diplomasi.html> (Diakses 13 Mei 2017).
- Phitik, Iwak. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Hubungan Internasional*. Dikutip dalam situs: <http://iwakpithik.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-hubunganinternasional.html> (Di akses pada 9 Mei 2017).
- Republika, *Israel Cabut Hubungan Diplomasi Negara Yang Membantu Palestina*, Dikutip dalam Situs: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/01/08/ojfyga396-israel-cabut-hubungan-diplomatik-negaranegara-yang-membantu-palestina> (Diakses pada 24 Mei 2017).
- Restuning Tunggal, Aprilia. *Ilmu Hubungan Internasinal Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sa'ad Karim Al-Fiqi, *Khiyanaat Hazzat Al-Tarikh Al-Islami* (Dar Al-Alamiyyah Iin Nasyr wat Tauzi: Kairo) trjm. Muhyiddin Mas Rida, *Pengkhianat-Pengkhianat Dalam Sejarah Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Samuel P. Huntingtong, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (Amerika Serikat: Simon & Schuster, 1996) tjrnm. Sadat Ismail,

- Benturan AntarPeradaban dan Masa Depan Politik Dunia (Cet XII, Jakarta: Qalam, 2012.
- Sandiani, Deasy. *Diplomasi Bilateral dan Multilateral Dalam Dinamika Politik Global Pasca Perang Dunia*. Dikutip dalam situs: <http://pengatardiplomasi.blogspot.co.id/2010/06/diplomasi-bilateral-dan-multilateral.html> (Diakses pada Juni 2017).
- Sean Freyne, *The World of the New Testament*. Wilmington: Michael Glazier Inc, 1980. trjm. I. Suharyo Pr, *Dunia Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Sefriani, *Hukum Internasional*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sholehi, Mohammad. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Strake, J. G. *Introduction To International Law* 2. Butterworth: LexisNexis UK, 1989. trjm. Bambang Iriana Djajaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional* 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharyo Pr, I. *Mengenal Alam Hidup Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif* , Hukum dan Pembangunan, www.jurnal.com (Diakses Januari 2016).
- Sumaryo, Suryokusomo. *Oranisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Sunanto, Musyirifah. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryono, Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Jakarta: Mandar Maju, 1992.
- Wibisono, Makarim. *Diplomasi Untuk Palestina: Catatan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rasdiyanah Thahir, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 5 Oktober 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Drs. Muh. Thahir dan Hasniah Thahir. Penulis memeluk agama Islam. Penulis menjalani pendidikan formal di SD Negeri Mangkura V dan tamat pada tahun 2007. Tahun 2007 terdaftar sebagai pelajar di SMPN 21 Makassar dan tamat pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan periode 2013 dan menjadi pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2015.